

Warta

PERTANIAN

VOLUME VII/EDISI JULI 2019



Jangan Takut,
**PANGAN
AMAN**



PENGARAH:

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian

PENANGGUNG JAWAB:

Kepala Biro Humas
dan Informasi Publik

PENYUNTING:

Drh. Moch. Arief Cahyono, M.Si

PELAKSANA:

Abiyadun, SE, MM

ANGGOTA:

Dra. Ria Satiti

Imam Santoso, SE

Fajar Rahman M, S.IKOM

Alice Raga Dewi, S.Sos

Hendrayani Yacub, S.Sos

Makmur, SE



Isi diluar tanggungjawab percetakan

Dilarang mengutip tanpa izin
Majalah Warta Pertanian

SALAM REDAKSI

GENDERANG PERANG TERHADAP KEKERINGAN

SEPERTI tahun-tahun sebelumnya, pemerintah selalu menghadapi 'musuh tahunan'. Apa itu? Musim kemarau yang bisa berdampak terhadap sektor pertanian. Selain tidak ada hujan, sumber-sumber air juga dilanda kekeringan. Meski demikian, melalui pengalaman yang dimiliki, pemerintah terus meminimalisir terjadinya puso atau gagal panen.

Sesuai prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), puncak kemarau terjadi pada Agustus hingga September 2019. Sementara musim hujan diperkirakan akan terjadi pada pertengahan November 2019. Jadi ada pergeseran musim hujan satu sampai dua bulan yang biasanya terjadi musim hujan pada Oktober.

Sejumlah daerah diperkirakan mengalami musim kemarau panjang atau sekitar 21 hari tanpa turun hujan. Akibatnya ada beberapa daerah berpotensi kekeringan dengan kategori 'Awat'. Daerah-daerah itu antara lain Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng), sebagian besar Jawa Timur (Jatim), DI Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Sementara daerah lainnya berstatus 'Waspada' kekeringan.

Nah dalam menghadapi musim kemarau panjang dan ancaman kekeringan, pemerintah sebenarnya sudah sejak lama mengantisipasi, bahkan sejak tiga tahun lalu. Langkah yang dilakukan, yakni membuat Sistem Mitigasi dan Adaptasi Kekeringan. Selain itu juga melakukan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, bantuan pompa air, hand tractor, alat mesin pertanian (alsintan) dan sebagainya

Saat ini, Kementan sedang menggenjatkan mitigasi bencana, salah satu caranya dengan penanaman padi gogo. Di samping itu, Kementan juga menggandeng Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk memerangi kekeringan agar petani terus berproduksi. Dukungan lain yang juga sedang dikerjakan TNI adalah mendirikan posko mitigasi di daerah-daerah yang terkena dampak kekeringan.

Selain itu, untuk memudahkan informasi potensi kekeringan, maka bisa dipantau melalui aplikasi Si-Perditan (Sistem Informasi Peringatan Dini dan Penanganan Perubahan Iklim pada sektor Pertanian). Bahkan aplikasi ini telah merencanakan upaya penanggulangan kekeringan.

Meski berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi gangguan produksi pangan akibat kekeringan. Toh pemerintah tidak merasa khawatir. Pasalnya, kekeringan yang terjadi kali ini pengaruhnya tidak terlalu signifikan terhadap produksi pangan. Luas lahan yang puso hanya sekitar 2 ribu hektare (ha). Ini sangat kecil dibandingkan luas pertanaman padi yang mencapai 15 juta ha. Artinya lagi, produksi pangan dalam negeri masih dalam batas aman. (*)





4



22



28



46



51

5

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan musim kemarau tahun ini diprediksi akan mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2019.

10

Musim kemarau memang menjadi persoalan tersendiri bagi petani. Sulitnya air membuat usaha tani menjadi terkendala.

14

Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 24 juni 2019, nilai ekspor pertanian naik 25,19 persen dibandingkan tahun lalu (year on year) atau senilai USD 0,32 miliar.

20

Setiap bulan, Indonesia selalu melakukan ekspor hasil pertanian ke berbagai negara.

22

Presiden Argentina Mauricio Macri menyambut hangat kehadiran Menteri Pertanian (Mentan) RI Andi Amran Sulaiman di Istana Kepresidenan, Buenos Aires, Senin (22/7/2019).

28

Musim kemarau memang menyebabkan kekeringan pada lahan petani.

34

Industri benih di Indonesia saat ini telah banyak mengeluarkan varietas benih sayuran yang sangat beragam.

46

Sejak dulu kekayaan alam Indonesia dikenal sangat melimpah. Bahkan kekayaan alam itu diabadikan dalam sejumlah lagu.

51

Gerbong Kementerian Pertanian (Kementan) mengalami perombakan.



Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksikan musim kemarau pada 2019 akan lebih kering, dan lebih terik dari pada tahun sebelumnya. Meski demikian, pemerintah, termasuk Kementerian Pertanian (Kementan) sudah mengantisipasi ancaman kekeringan tersebut, sehingga ketersediaan pangan nasional dapat terjaga dengan baik.



Kami juga telah membuat Sistem Mitigasi dan Adaptasi Kekeringan. Hingga kini saya melihat kekeringan yang menimpa lahan pertanian masih dalam batas aman terhadap produksi pangan,”

Andi Amran Sulaiman
Menteri Pertanian

Musim Kemarau 2019 dan Antisipasi Kekeringan Terhadap Sektor Pertanian

JANGAN TAKUT, PANGAN AMAN

BADAN Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan musim kemarau tahun ini diprediksi akan mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2019. Sejumlah daerah diperkirakan mengalami musim kemarau panjang, misalnya 21 hari tanpa hujan. Dengan demikian, sejumlah wilayah memasuki Status Waspada kekeringan. Adapun daerah dengan potensi kekeringan kategori Awas antara lain Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng), sebagian besar Jawa Timur (Jatim), DI Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Nah dalam menghadapi musim kemarau dan ancaman kekeringan, pemerintah sebenarnya sudah sejak lama mengantisipasi, bahkan sejak tiga tahun lalu. Misalnya dengan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, bantuan pompa air, handtraktor, alat mesin pertanian (alsintan) dan sebagainya

“Kami juga telah membuat Sistem Mitigasi dan Adaptasi Kekeringan. Hingga kini saya melihat kekeringan yang menimpa lahan pertanian masih dalam batas aman terhadap produksi pangan,” ujar Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman usai pelantikan pejabat

Eselon 1 dan 2 di gedung Kementan Jakarta, Senin (29/7/2019)

Kekeringan yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia bahkan pengaruhnya tidak terlalu signifikan terhadap produksi pangan. Pasalnya, luas lahan yang puso atau rusak parah hanya sekitar 2 ribu hektare (ha). Ini sangat kecil dibandingkan luas pertanaman padi yang mencapai 15 juta ha. "Keringan tidak terlalu signifikan, biasa hanya kaget saja karena kemarau. Tapi secara nasional kecil karena luas tanam padi kita mencapai 15 juta ha," tandas Amran.

Direktur Perlindungan Tanaman Direktorat Perlindungan Tanaman Kementan Edy Purnawan mengatakan, saat ini Kementan sedang mengencakan mitigasi bencana untuk mengantisipasi dampak kekeringan. Salah satu caranya dengan penanaman padi gogo.

"Padi gogo ditanam di lokasi kekeringan yang memungkinkan masih ditanami. Beberapa wilayah dilakukan percepatan penanaman padi gogo. Saat ini, kami sedang bergerak turun ke lapangan untuk percepatan padi gogo sawah, terutama di wilayah Pantura," jelasnya.

Menurut Edy, pihaknya juga memanfaatkan rawa tengahan atau rawa dalam yang mengering dan airnya menjadi dangkal untuk ditanami padi. Selain itu, kementerian telah mendistribusikan 52 ribu unit pompa air di lokasi kekeringan untuk memastikan adanya irigasi atau saluran air.

Upaya lainnya, Kementan telah mendirikan posko kekeringan di sejumlah kabupaten terdampak. Kepala Dinas Pertanian dan Balai Proteksi di beberapa wilayah

telah dibentuk, dan posko ini nantinya akan menjadi pusat data dan informasi serta komando upaya penanganan kekeringan, serta berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Dinas Pengairan/Perusahaan Jasa Tirta II serta Kodim.

Dalam rangka pengamanan standing crops pertanaman menghadapi musim kemarau dan penambahan luas tanam padi, Ditjen Tanaman Pangan Kementan bersama Kodim/Korem, PJT 2, Dinas Pertanian Kabupaten, melakukan gerakan Tanam Padi Gogo Sawah di wilayah Pantura mulai Bekasi, Kerawang, Subang, Indramayu, Cirebon. "Penggunaan benih tahan kekeringan kita dorong digunakan. Penholahan tanah lahan cukup diairi tanpa dilumpuri, dan benih langsung disebar saja," ujar Edy.

Saat ini, lanjut dia, Kementan melakukan gerakan tanam melibatkan seluruh stakeholder baik petani, petugas penyuluh, mantri tani, petugas dinas dan TNI dengan mengoptimalkan mobilisasi alsintan, memberikan bantuan benih yang ditanam dengan cara sebar, serta bantuan solar untuk mobilisasi pompanisasi.

Kementan mencatat luas terkena kekeringan periode Januari-Juni 2019 seluas 155.439 ha, dengan angka puso seluas 20.050 ha. Sebenarnya luas puso ini masih lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya seluas 26.263, dan rata-rata selama lima tahun terakhir seluas 28.7187 ha.

Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan Agung Hendriadi menambahkan, luas lahan padi yang puso akibat kekeringan hanya sekitar 2 ribu ha. Kekeringan umumnya terjadi di hampir seluruh wilayah Jawa. Hitungannya, jika produktivitas sebesar 6 ton/ha, maka





berkurangnya produksi hanya 12 ribu ton. Jumlah itu masih sangat kecil dibandingkan stok beras pemerintah yang minimal mencapai 500 ribu ton. "Kemarau memang mempengaruhi panen, tapi tidak terlalu signifikan untuk stok karena cadangan beras pemerintah cukup banyak. Yang puso kurang lebih 2 ribu ha," tuturnya.

Padahal, lanjut Agung, di beberapa wilayah lainnya, meski kemarau masih tetap ada yang panen. Bahkan Serapan Gabah (Sergap) pada Juni lalu masih mencapai 15 ribu ton/hari dan Juli sebesar 10 ribu ton/hari. "Insya Allah pasokan beras kita aman, karena serapan gabah/beras Bulog masih terus berjalan," katanya.

Hingga Juli, volume pengadaan Perum Bulog sudah sebanyak 866.124 ton. Pada Agustus, target Sergap secara kumulatif mencapai 1,2 juta ton, September menjadi 1,4 juta ton, Oktober 1,6 juta ton, Nopember 1,7 juta ton dan Desember mencapai 1,8 juta ton.

Agung berharap target pengadaan Bulog tersebut bisa tercapai. Sebab, pemerintah kini makin mempermudah Bulog untuk membeli gabah/beras petani. Selain, kebijakan fleksibilitas harga dalam pengadaan PSO (public service obligation), pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan baru dalam pengelolaan cadangan beras pemerintah (CBP).

Kebijakan tersebut berupa Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No 38/2018 dan Peraturan Menteri Perdagangan dan Peraturan Menteri Keuangan. Dalam kebijakan itu, Bulog bisa membeli gabah/beras secara komersial dengan harga pasar. "Nantinya pemerintah akan membayarkan selisih harga dengan harga pembelian pemerintah (HPP)," tuturnya.

Agung memperkirakan, stok beras sampai akhir tahun dari 2.4 juta ton ditambah 900 ton menjadi 3.3 juta ton. Kemudian keluar 500 ribu ton. Jadi akhir tahun masih ada sekitar 2.5 juta ton.

Informasi Iklim

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Dirjen PSP) Sarwo Edhy menuturkan, Kementan sudah melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi musim kemarau. Ini di antaranya, menyebarluaskan informasi prakiraan iklim musim kemarau dan peningkatan kewaspadaan terhadap kekeringan kepada seluruh gubernur dan dinas provinsi terkait.

Nah untuk menjaga ketersediaan sumber air, Ditjen PSP juga berencana akan membangun long storage di lokasi tersebut. Untuk diketahui, Long Storage adalah bangunan penahan air yang berfungsi menyimpan air di dalam sungai, kanal dan atau parit pada lahan yang relatif datar dengan cara menahan aliran untuk menaikkan permukaan air sehingga cadangan air irigasi meningkat.

Ditjen PSP menganggarkan bantuan pemerintah untuk kegiatan pengembangan embung pertanian, termasuk long storage sebesar Rp 120 juta per unit untuk kegiatan fisik seperti (pembelian bahan konstruksi dan biaya tenaga kerja. Adapun syarat untuk bangunan long storage diantaranya, memiliki volume tampungan minimal 500 meter kubik. Luas lahan usaha tani pun diupayakan minimal 25 ha untuk tanaman pangan, 5 ha untuk hortikultura, 5 ha untuk perkebunan dan 5 ha untuk peternakan.



TNI Ikut Kawal

Sejumlah area tanam mengalami dampak kekeringan pada musim kemarau 2019. Namun, dampak tersebut mampu diatasi secara baik dengan mekanisasi pompa serta keterlibatan tentara dalam mengawal petani agar terus berproduksi.

Waster Kasad Brigjen TNI Gathut Setyo Utomo mendukung upaya Kementerian Pertanian (Kementan) dalam menanggulangi dampak kekeringan yang melanda sejumlah daerah. Dukungan itu antara lain melibatkan langsung personel TNI yang ada di seluruh daerah. "Kita dalam melaksanakan operasi militer. Selain perang, salah satunya mengatasi kekeringan atau bencana alam. Maka itu, kita menjalin bekerja sama dengan Kementan untuk melakukan pendampingan," ujarnya dalam rapat koordinasi mitigasi kekeringan di Gedung Auditorium Kementan, Senin (8/7/2019).

Menurut Gathut, TNI sendiri selama empat tahun terkakhir sudah melibatkan diri pada penanganan dampak kekeringan. Pengalaman itu menjadi bekal bahwa pemetaan wilayah dan pompanisasi menjadi penting dan harus dikerjakan bersama-sama. "Soal mitigasi, tentu kita sudah memiliki pengalaman banyak karena beberapa kali kita turun ke lapangan bersama Kementan. Jadi, seperti kata Dirjen Tanaman Pangan, bahwa menanggulangi kekeringan itu tidak bisa sendirian. Bagaimanapun harus ada sinergitas," tandasnya.

Gathut mengatakan, dukungan lain yang juga sedang dikerjakan TNI adalah mendirikan posko mitigasi kekeringan





di daerah-daerah yang terkena dampak. Beberapa diantaranya ada di kawasan Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan provinsi lain di luar Pulau Jawa. "Selama ini *kan* kita sudah melakukan pendampingan Upsus (Upaya Khusus) yang diinisiasi para Babinsa. Mereka juga mengawal pembagian air supaya tidak rebutan dan menjebol titik air. Kemudian kita ikut mengawasi jalannya pompanisasi serta menjaga keamanan dan ketertiban lain," katanya.

Langkah Strategis

Sementara untuk mengamankan produksi pangan nasional menghadapi kekeringan tahun ini, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (Ditjen TP) menyiapkan langkah strategis. Usai dilantik, Direktur Jenderal (Dirjen) Tanaman Pangan Suwandi langsung menggelar rapat koordinasi dengan Penanggungjawab Upsus Provinsi untuk menyamakan langkah pencapaian target tanam pada Agustus di Jakarta, Selasa (30/7/2019).

Pada rapat tersebut, Suwandi memberikan instruksi kepada jajaran di bawahnya untuk langsung bergerak merespon kekeringan yang terjadi di beberapa daerah sentra padi. Pertama, segera inventarisir data Luas Tambah Tanam (LTT) secara harian dan agar ada peningkatan signifikan. "Ya ini langkah yang penting agar di bulan Agustus tahun ini target kita luas tanam sekitar 1,4 juta hectare (ha) bisa dicapai," katanya.

Kedua, Suwandi meminta tim LTT untuk mengecek lahan-lahan potensi ditanami padi gogo, jagung atau kedelai atau dilakukan tumpang-sari pada tiga komoditi tersebut. Cek kondisi tanah yang masih macak-macak bisa segera ditanam padi gogo sawah. "Untuk itu perlu dilakukan percepatan CPCL (calon petani calon lahan) penyaluran dan penambahan luas tanam padi di lahan kering atau gogo sawah yang dilaksanakan di delapan provinsi," sebutnya.

"Apabila CPCL sudah siap, maka benih segera salur agar bisa tanam mengejar ketersediaan air yang masih ada

bulan ini. Targetnya, penyelesaian tanam padi gogo paling lambat 2 minggu dari hari ini," tambah Suwandi.

Ketiga, lanjut Suwandi, tim LTT juga untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mendirikan posko kekeringan dalam rangka mitigasi kekeringan. Setiap Kabupaten mendirikan posko kekeringan dan diresmikan oleh Bupati.

"Keempat, untuk daerah yang sudah terdampak puso, kami meminta petani yang sudah terdaftar AUP (Asuransi Usaha Tani Padi) segera melakukan klaim asuransinya dan tim LTT bisa mendata bagi yang belum terdaftar untuk diusulkan menerima bantuan benih padi Pusat," bebernya.

Kelima, Suwandi meminta Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian agar segera menyalurkan alsintan, sumur dangkal dan pompa untuk penanganan wilayah yang terdampak kekeringan. Sedangkan daerah di utara katulistiwa seperti Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi masih memiliki potensi hujan sehingga bisa dilakukan percepatan tanam. "Manfaatkan semaksimal mungkin wilayah yang masih ada air," ucapnya.

Keenam, untuk mengamankan pangan nasional menghadapi kekeringan perlu dilakukan penanaman integrasi jagung dengan tanaman lain. Hal ini dikarenakan konsep integrasi bisa meningkatkan pendapatan bagi petani. "Potensi pematang sawah juga bisa dioptimalkan untuk tumpang sari tanaman seperti kacang panjang, kacang merah, cabe, tomat, terong maupun refugia," pungkas Suwandi. **(tim humas)**





SAVE PETANI DENGAN

POMPA DAN DAM PARIT

MUSIM kemarau memang menjadi persoalan tersendiri bagi petani. Sulitnya air membuat usaha tani menjadi terkendala. Nah guna mencegah kekeringan makin meluas, ratusan pompa sudah diturunkan untuk disiagakan agar petani dapat terus mendapatkan pasokan air.

Seperti yang terlihat di Desa Sidamulya Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Penyuluh terlihat mendampingi untuk mengupayakan petani mendapatkan air dengan pompanisasi di saluran sekunder. "Yang penting tanaman padinya terselamatkan. Namun dampaknya petani di ujung (hilir) tidak kebagian air," kata Direktur Irigasi Pertanian, Rahmanto.

Data dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jabar, hingga 2 Juli 2019 di Kabupaten Indramayu tercatat sebanyak 14.617 hektare (ha) luas pertanaman padi

terancam kekeringan dari luas tanam mencapai 97.107 ha atau hanya sekitar 7,83 persen.

Rahmanto menyebutkan, mayoritas yang terkena dampak kekeringan adalah sawah tadah hujan yang tidak mengalami hujan lebih dari 30 hari. Kabupaten Indramayu memang dikenal sebagai daerah dengan potensi air yang rendah. Sementara mayoritas petani tidak mengindahkan rekomendasi petugas untuk bertanam. "Potensi sumber air juga hanya bisa mengairi sawah yang terdekat dengan sumber air," tuturnya.

Karenanya, lanjut Rahmanto, pompanisasi bisa menjadi jalan bagi sawah yang terletak jauh dari sumber air. Namun, penggunaan pompanisasi juga membutuhkan upaya lainnya agar petani mendapatkan air yang merata.

Lebih lanjut Rahmanto menuturkan, jika pemerintah telah mengupayakan berbagai upaya untuk mengatasi

kekeringan tersebut, utamanya bagi daerah yang terkenal rawan kekeringan. Ini mulai dari perbaikan saluran irigasi (Jitot dan Jides), mobilisasi pompa air untuk mengamankan standing crop, terutama pada daerah yang masih memiliki sumber air seperti sumur pantek, sungai dan sebagainya.

Sementara di Desa Girimukti, Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, petani setempat tak ingin larut dalam kesedihan dan terkungkung kondisi alam. Asep Heri, ketua Kelompok Tan (Poktan) Trio Aren di Desa Girimukti, Cipongkor, Bandung Barat bersama petani lainnya tiap tahun kerap harus berhadapan dengan ancaman kekeringan saat musim kemarau. Permasalahan seringkali timbul saat musim kemarau adalah debit air. Air yang seharusnya mengairi sawah di awal pertanaman justru tidak bisa mengalir karena kecilnya debit air. Namun sejak adanya dam parit, petani kini bisa mengatasi persoalan air saat musim kemarau.

"Kami sampai harus pakai bambu dan jerami untuk membendung sementara air agar bisa masuk ke jaringan irigasi. Tapi bendungan sementara itu juga jebol kalau hujan turun," kata Asep.

Bosan terus menerus harus membuat bendungan sementara untuk menyelamatkan tanaman padi, Poktan Trio Aren lalu mengajukan permohonan memperoleh bantuan infrastruktur air berupa dam parit. Sejak 2018, dam parit yang tersambung dengan jaringan irigasi tersier sejauh tiga km untuk bisa mengairi sawah seluas 50 ha.

Berkat keberadaan dam parit, kini petani bisa lebih leluasa bertanam padi. Bahkan Indeks pertanaman (IP) yang semula hanya 2 kali menjadi 2,5 kali. "Sebelumnya, cuma dua kali. Itu juga yang (musim) kedua, (produksi) susah payah. Kalau sekarang bisa 2,5 kali dan tidak susah payah," cerita Asep.

Dia mengungkapkan, dalam mengajukan infrastruktur air tersebut sebenarnya petani berharap pemerintah membuatkan embung. Namun setelah disurvei, ternyata lokasinya lebih cocok untuk dam parit dengan memanfaatkan sungai yang melintas. "Kita dapat bantuan Rp 120 juta dan kita bangun dengan swakelola dan gotong royong dengan masyarakat," katanya.

Bangunan air seperti dam parit di Desa Girimukti ini memang sebagai bentuk antisipasi ketersediaan air selama musim kemarau. Sehingga meskipun debit air kecil, air masih bisa teralirkan ke sawah petani. "Kita bangun untuk antisipasi kekeringan, sehingga petani bisa menambah pertanaman dalam setahun, dari 1 kali menjadi 2 kali, 2 kali menjadi 3 kali," tutur Kasubdit Iklim Konservasi Air dan Lingkungan Hidup, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Andi Halu.

Infrastruktur air ini juga sangat berguna dalam pengelolaan air lahan kering maupun tadah hujan. Berbeda dengan embung, dam parit dibangun dengan membendung sungai kecil atau parit alami. Untuk pengembangan dam parit, sungai yang dibendung memiliki debit minimal 5 liter per detik dan dengan luas lahan usaha tani yang dapat diairi minimal 25 ha.

Tak hanya itu, agar dampak dam parit bisa lebih besar, pembangunannya bisa secara bertingkat dari hulu ke hilir dalam satu aliran Daerah Aliran Sungai (DAS) mikro. Model pengembangan dam parit bertingkat di DAS hulu sangat ideal untuk dikombinasikan dengan pengelolaan air dan sedimen di waduk atau embung besar.

Sejak lima tahun terakhir pemerintah juga membangun sebanyak 2.962 unit embung. Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Sarwo Edhy mengatakan, dengan jumlah embung yang terbangun sebanyak 2.962 unit, jika estimasi luas layanan embung, dam parit, long storage seluas 25 ha, maka potensi akan mampu memberikan dampak pertanaman seluas 73.850 hektar (ha).

"Bila dapat memberikan dampak pada kenaikan IP 0,5, maka akan terjadi penambahan luas tanam 36.930 ha dan penambahan produksi padi sebesar 384.020 ton," katanya.

(tim humas)

YUKS PANTAU KEKERINGAN DENGAN

Si-Perditan

PADA tahun ini awal musim kemarau di beberapa daerah di Indonesia sudah terjadi pada April lalu. Hasil pantauan dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) wilayah yang telah memasuki musim kemarau meliputi Aceh (pesisir utara dan timur), Sumatera Utara bagian utara, Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, NTB, NTT, Kalimantan bagian tenggara, pesisir barat Sulawesi Selatan, pesisir utara Sulawesi Utara, pesisir dalam perairan Sulawesi Tengah, sebagian Maluku dan Papua bagian selatan. Musim kemarau tentu dapat meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran lahan, serta kegagalan panen.

Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Ketut Kariyasa mengatakan, Kementerian Pertanian (Kementan) telah memprediksi dan mengantisipasi, serta menginformasikan potensi kekeringan yang akan melanda di sebagian besar daerah di Indonesia melalui aplikasi Si-Perditan, bahkan telah merencanakan upaya penanggulangannya. Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus-September dan berlanjut sampai Oktober 2019.

Sementara itu musim hujan diperkirakan akan terjadi pada pertengahan November 2019. Jadi ada pergeseran musim hujan satu sampai dua bulan yang biasanya terjadi musim hujan pada Oktober.

Berdasarkan pengalaman saat menghadapi dan mengantisipasi kegagalan panen akibat kekeringan pada 2015 (El-Nino kuat), Ketut mengungkapkan, ada beberapa langkah operasional yang dilakukan Kementan dan pemda atau dinas pertanian provinsi, kabupaten/kota).

Pertama, merencanakan jadwal tanam dan pemilihan komoditas tanaman yang tahan kekeringan. Misalnya, tanaman jagung, ubi kayu dan lainnya pada Agustus dan September karena merupakan puncak bulan kekeringan. Kedua, pengaturan dan penjadwalan buka tutup pintu-pintu air di waduk/bendungan dengan memanfaatkan informasi tinggi muka air (TMA) yang ada di aplikasi Si-Perditan.

Ketiga, optimalisasi penggunaan pompa air pada sumber air seperti dam-parit atau sumur dangkal dan dalam oleh Brigade Tanam. Keempat, penerapan sistem pembibitan kering dan dapog (tray) serta pengolahan tanah awal. Dengan

demikian saat hujan turun bibit dapat langsung ditanam karena kemunduran awal musim hujan (MH) selama 1-2 bulan yakni bulan dan November. "Melalui upaya-upaya tersebut kegagalan panen akibat kekeringan dapat diminimalisir kerugiannya," kata Ketut Kariyasa.

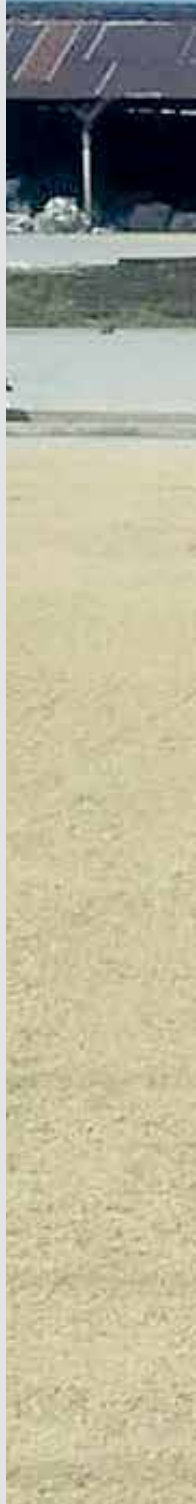
Bahkan, lanjutnya, untuk memantau kesiapan daerah dan petugas lapangan dalam menghadapi dan mengantisipasi dampak kekeringan terhadap stabilisasi pasokan dan harga pangan, khususnya beras di beberapa daerah terdampak kekeringan, pihaknya telah menerjunkan Tim Pusdatin pada 1-4 Juli 2019 di beberapa daerah. "Tim dibagi menjadi dua, yakni tim yang bertugas memverifikasi kondisi sumber-sumber air seperti waduk/bendungan dan kondisi pertanaman khususnya pertanaman padi dan tim yang bertugas melakukan verifikasi dan pemantauan pasokan dan harga beras," tuturnya.

Sementara hasil pantauan tim yang melakukan pemantauan kondisi pertanaman padi di beberapa lokasi di Kabupaten Sleman, Kulon Progo dan Gunung Kidul, Yogyakarta menunjukkan kondisi pertanaman padi masih tumbuh dengan baik. Sebab, air irigasi masih tercukupi walaupun ada pengaturan atau pergiliran jadwal pengairan.

Hal ini dibuktikan dengan hasil pemantauan terhadap kondisi tinggi muka air (TMA) yang ada di Waduk/Bendungan Sermo yang berlokasi di Kabupaten Kulon Progo. Kondisi air masih normal dengan elevasi TMA pemantauan 131,49 meter dan elevasi TMA rencana 121,68 meter (per 1 Juli 2019).

Sedangkan secara umum fase pertanaman padi (standing crop) di beberapa kecamatan di Kabupaten Sleman, Kulon Progo dan Gunung Kidul sangat bervariasi. Ada yang vegetatif-1 umur tanaman 16-30 hari setelah tanam (HST sampai generatif-1 atau mau panen). "Kondisi pertanaman padi yang bervariasi ini menggambarkan bahwa panen padi satu sampai dua bulan ke depan di Yogyakarta masih aman sehingga pasokan beras masih cukup," ujarnya.

Sementara itu, hasil pemantauan pasokan dan harga beras di pedagang grosir dan eceran di beberapa daerah di Yogyakarta seperti Kabupaten Gunung Kidul, Bantul, Sleman, Kulon Progo dan Kota Yogyakarta menunjukkan pasokan pangan. Ini khususnya beras masih aman sampai satu sampai



dua bulan ke depan dan harga masih stabil.

Pasokan beras di beberapa pedagang eceran di Kabupaten Gunung Kidul, Bantul, Sleman, Kulon Progo dan Kota Yogyakarta sebesar satu hingga tiga ton per minggu. Sedangkan untuk pasokan beras di beberapa pedagang grosir dan eceran sebesar 5-35 ton per minggu, dan harga beras berkisar Rp8.500 - Rp9.500 per kg.

Untuk pasokan beras yang di perdagangkan di Kabupaten Gunung Kidul sebagian berasal dari kabupaten di Jawa Tengah. Ini di antaranya Kabupaten Purworejo, Klaten, Sukoharjo, Sragen dan Pati. Sementara itu, sebagian besar kebutuhan beras rumah tangga tani di Gunung Kidul berasal dari hasil panen padi sendiri. "Mereka umumnya tidak menjual panennya tetapi disimpan untuk di konsumsi sendiri," ujar Ketut Kariayasa. **(tim humas)**





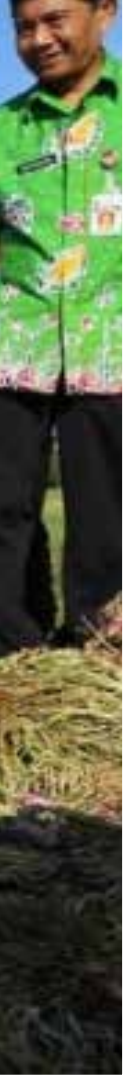
**Sektor Pertanian Pacu Pertumbuhan
Ekonomi Nasional**

VOLUME EKSPOR **TUMBUH** SPEKTAKULER

Indonesia mengalami surplus dalam neraca perdagangan produk pertanian. Untuk meraihnya tentu saja tidak mudah. Perlu kerja keras dan ketepatan dalam menentukan kebijakan dan program-program terobosan, seperti yang dilakukan Kementerian Pertanian (Kementan).

BERDASARKAN data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 24 juni 2019, nilai ekspor pertanian naik 25,19 persen dibandingkan tahun lalu (year on year) atau senilai USD 0,32 miliar. BPS mencatat, kenaikan nilai ekspor pertanian ini menjadi salah satu variabel penting yang menyebabkan kenaikan ekspor nasional Mei 2019 sebesar USD 14,74 miliar, naik 12,42 persen secara bulanan (month on month). Alhasil, neraca perdagangan nasional pun surplus sebesar USD 207,6 juta.

Nah di antara sejumlah negara tujuan ekspor, ada satu yang menonjol karena telah berkontribusi positif terhadap surplus neraca perdagangan



produk pertanian Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Siapa? Adalah Spanyol.

Berdasarkan catatan Pusat Data dan Informasi Pertanian (Pusdatin) Kementan, selama periode 2014-2018 volume ekspor produk pertanian Indonesia ke Spanyol tumbuh luar biasa, yaitu 24,0 persen atau tumbuh rata-rata 6,3 persen per tahun, dari sebanyak 1,0 juta ton pada 2014 meningkat menjadi 1,24 juta ton pada 2018. Demikian pula dengan nilai ekspor, tumbuh spektakuler 20,7 persen atau tumbuh rata-rata 6,7 persen per tahun, dari Rp9,75 triliun pada 2014 meningkat menjadi Rp11,76 triliun pada 2018.

Surplus neraca perdagangan produk pertanian Indonesia ke Spanyol juga tumbuh spektakuler. Dalam bentuk volume, selama 2014-2018 surplus neraca

perdagangan produksi pertanian Indonesia tumbuh 23,50 persen atau tumbuh rata-rata 6,40 persen per tahun, dari 996,7 ribu ton pada 2014 meningkat menjadi 1,23 juta ton pada 2018. Hal yang sama juga terjadi dalam bentuk nilai, di mana surplus neraca perdagangan produk pertanian Indonesia ke Spanyol tumbuh positif 20,06 persen. Atau tumbuh rata-rata 6,80 persen per tahun, dari Rp9,43 triliun pada 2014 menjadi Rp11,42 triliun pada 2018.

Kepala Pusdatin Ketut Kariyasa menyampaikan, catatan ini merefleksikan peran penting dan strategis sektor pertanian dalam memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Peran tersebut ditunjukkan oleh kontribusinya yang positif dalam neraca perdagangan Indonesia empat tahun terakhir.

Ia menambahkan, untuk terus meningkatkan kontribusinya dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan, selain terus mendorong investor untuk berinvestasi pada sektor pertanian. Kementan juga terus berupaya memperkuat kapasitas produksi dalam negeri dan mendorong peningkatan ekspor produk pertanian ke berbagai negara. "Ini melalui upaya-upaya ini diharapkan peran dan kontribusi sektor pertanian akan semakin meningkat, dan pada saat yang sama juga diharapkan kesejahteraan keluarga petani yang jumlahnya lebih dari 65 persen penduduk Indonesia semakin membaik," tutup Kariyasa.

Sementara itu, Badan Karantina Pertanian (Barantan) mengambil langkah cepat untuk mendorong ekspor dengan penggunaan sertifikat elektronik (e-Cert). Kali ini, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman yang diwakili Kepala Barantan Ali Jamil bersama Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo melepas ekspor perdana Edamame ke Belanda melalui e-Cert, di Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, Rabu (3/7/2019). Hadir Inspektur Jenderal

Kementan Justan Riduan Siahaan, Direktur Kepabebean Fadjar Dhonny, Sekretaris BKIPM Septiama dan para pelaku usaha.

Jamil menjelaskan, Edamame yang diekspor perdana ini diproduksi petani di Wonosobo, Temanggung, dan Magelang, Volumennya sebanyak 40 ton dari total permintaan 480 ton dengan nilai ekonomi Rp13,2 miliar. Sebelumnya, Edamame asal Jateng ini telah diekspor ke Jepang, Lebanon, Amerika Serikat, India dan Singapura. Kini mendapat pasar baru ke Belanda. "Semenjak diberlakukan pada 2015, penggunaan e-Cert baru dilakukan ketiga negara, yakni New Zealand, Australia dan Belanda dan pada 1 Juli 2019 ditambah dengan Vietnam yang bisa diterapkan di wilayah ASEAN," ujar Jamil saat melepas ekspor perdana kedelai sayur (Edamame) ke Eropa melalui Pelabuhan Rotterdam di Belanda.

Dia menegaskan, selain melalui penggunaan e-Cert, akselerasi ekspor juga dilakukan dengan penggunaan aplikasi peta komoditas ekspor produk pertanian i-MACE (Indonesian Maps of Agricultural Commodities Export). Pemerintah daerah (pemda) diarahkan untuk menggunakan aplikasi ini agar dapat memetakan sentra dan jenis komoditas unggulan dan negara tujuan ekspor.

Di lain pihak, Balai Uji Terap Teknik dan Metoda Karantina Pertanian Barantan pada Selasa (2/7/2019) meluncurkan empat inovasi tindakan perlakuan karantina. "Alhamdulillah, upaya panjang sejak 2011 telah membuahkan hasil, empat tindakan perlakuan karantina untuk produk unggulan ekspor, yakni Mangga, Sarang Burung Walet, Tanaman Hias, dan perlakuan Fumigasi dapat dirampungkan," kata Ali Jamil, kepala Barantan saat peluncuran.

Dia menjelaskan, saat ini dunia melalui kesepakatan Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO) telah menerapkan kebijakan Non-Tariff Barriers yang mendorong perdagangan bebas, tanpa kecuali termasuk komoditas pertanian. Seluruh komoditas pertanian dapat diperdagangkan kecuali memiliki hambatan teknis non tarif, salah satunya berupa persyaratan Sanitary and Phytosanitary, SPS. Persyaratan keamanan dan kesehatan produk ini menjadi hambatan teknis jika tidak dipenuhi, untuk itu diperlukan tindakan perlakuan karantina agar produk dapat diterima negara mitra dagang.

"Ini sesuai dengan instruksi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk memacu ekspor komoditas pertanian kita. Hari ini (2 Juli 2019, red) kita luncurkan empat inovasi, tindakan perlakuan karantina untuk komoditas mangga, sarang burung walet, tanaman hias, dan tindakan fumigasi. Kita tembus hambatan teknis agar bisa menembus pasar dagang dunia," terang Jamil.

Secara rinci, Kepala Balai Uji Terap Teknik dan Metoda Karantina Pertanian Wawan Sutian menjelaskan, empat

tindakan perlakuan karantina yang telah dihasilkan Barantan ini, yakni masing-masing perlakuan tindakan karantina pada buah mangga Gedong dan Arumanis berupa hot water treatment (HWT) untuk mengeliminasi *Bactrocera papayae*. Yang kedua, perlakuan fumigasi Sulfuryl Fluoride (SF) untuk mengeradikasi *Dinoderus minutus* pada kayu log.

Selanjutnya adalah perlakuan terhadap tanaman hias *Polyscias sp*, berupa hot water treatment (HWT) untuk mengeliminasi nematoda *Radopholus similis* pada tanaman hias *Polyscias sp*. Dan inovasi yang keempat, yakni pada komoditas sarang burung walet (SBW) yang di akhir tahun 2018 berhasil membukukan volume ekspor hampir 1.200 ton dengan nilai ekonomi sekitar Rp50 triliun.

Sementara untuk meningkatkan volume ekspor komoditas pertanian, Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian (BBUSKP) Barantan Kementan menggelar pelatihan khusus bagi 32 eksportir benih komoditas pertanian asal Jabodetabek, Jabar, Jateng dan Jatim. "Saat ini ada 58 negara tujuan ekspor (importer, red) benih komoditas pertanian kita. Ini harus kita jaga, bahkan kita tingkatkan ke depan. Ini agar tidak ada hambatan teknis persyaratan SPS (Sanitary dan Phytosanitary), kita dari Barantan siap mengawal," kata Jamil saat membuka acara Bimbingan Teknis di Jakarta, Jumat (5/7).

Jamil menjelaskan, hal ini merupakan upaya untuk meningkatkan aseptabilitas pasar ekspor benih komoditas pertanian dalam negeri di pasar dunia, kesehatan benih merupakan salah satu syarat penting yang harus dipenuhi. Benih-benih yang diproduksi selain memiliki mutu fisik baik, kemurnian spesies tinggi, daya berkecambah dan vigoritas tinggi, ukuran seragam, juga harus sehat yaitu bebas dari biji gulma dan penyakit seedborne.

Di lain pihak, Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo dalam kegiatan Soropadan Expo 2019 di Pusat Pelayanan Agribisnis Petani (PPAP) Soropadan, Magelang, Kamis (4/7/2019) memberikan acungan jempol akan gebrakan yang dilakukan Kementerian Pertanian (Kementan) di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam mengejawantahkan perintah Presiden Jokowi untuk meningkatkan neraca perdagangan dengan memacu ekspor komoditas pangan. Gebrakan tersebut di antaranya penggunaan teknologi digital dari hulu hingga hilir, peningkatan sumberdaya petani, pengembangan pangan lokal dan kemudahan pelayanan penerbitan izin ekspor.

Ganjar menyebutkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng dan Kementan memiliki misi yang sama dalam mendongkrak neraca perdagangan, yakni melalui akselerasi ekspor. Pemprov Jateng memiliki aplikasi Agro Jowo sebagai pasar digital bagi petani dan konsumen. Sementara Kementan memiliki



terobosan berupa aplikasi i-MACE (Indonesian Maps of Agricultural Commodities Export), untuk mengetahui seluruh potensi-potensi pertanian berdaya ekspor, menerapkan sertifikat elektronik sehingga kegiatan ekspor menjadi cepat dan pasar lelang yang membantu petani memasarkan komoditas untuk mendapatkan keuntungan yang jauh lebih tinggi.

Koneksi dengan Pasar

Kementerian Pertanian (Kementan) terus melakukan berbagai terobosan untuk memacu produksi, mutu

hasil panen dan ekspor produk hortikultura terutama di era digital saat ini. Salah satu yang kini gencar dilakukan adalah mengkonsolidasikan kelembagaan usaha petani di kawasan-kawasan produksi hortikultura yang terhubung langsung dengan jejaring ekspedisi kargo, gudang serta sistem pemasaran berbasis daring (online)

Kebijakan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman untuk meningkatkan ekspor dan hilirisasi produk ini, diyakini dapat memacu pertumbuhan produksi, perbaikan mutu hasil panen dan memperluas akses pemasaran bagi para petani hortikultura. "Untuk meningkatkan skala ekonomi usahatani, kita



himpun dan korporasikan kelompok-tani kecil-kecil di kawasan hortikultura membentuk badan usaha sejenis koperasi. Dengan begitu bisa diseragamkan dan diatur input produksi, cara berbudidaya hingga pengelolaan pascapanen dan pemasarannya,” ujar Dirjen Hortikultura Kementan Suwandi saat membuka Pertemuan Nasional Perencanaan Hortikultura di DI Yogyakarta, Rabu, (10/7/2019).

Dia menjelaskan, mengkorporasikan kelompok-tani kecil ini pada prinsipnya agar bagaimana biaya produksi petani bisa efisien dengan kualitas dan produktivitas yang optimal sekaligus terhubung dengan sistem logistik dan pemasarannya. Terkait kawasan produksi hortikultura khususnya aneka cabai dan bawang merah akan diprioritaskan untuk pengembangan di luar Pulau

Jawa, untuk wilayah Jawa fokus ke hilirisasinya.

“Kami terus mendorong dan menumbuhkan Pasar Lelang di setiap kawasan produksi. Sudah berjalan pasar lelang di 13 kabupaten sentra cabai. Pasar Lelang ini gunanya untuk memotong rantai pasok, menciptakan satu harga di satu kawasan serta petani bisa dapat uang langsung karena sifatnya *cash and carry*,” jelasnya.

Di tempat terpisah, Guru Besar Ekonomi Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Dr M. Firdaus mengatakan, pemerintah harus tetap fokus menggarap komoditas hortikultura tertentu yang strategis untuk menggebrak dan menguasai ekspor. Ini sesuai kebijakan Mentan Amran untuk menggerakkan

ekspor dan investasi pertanian. "Peningkatan daya saing hortikultura Indonesia menjadi agenda penting dan mendesak. Permintaan dunia ke depan masih terus meningkat untuk produk pertanian primer dan hasil olahannya, khususnya hortikultura," ujarnya usai pemaparan Penyusunan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Hortikultura di DI Yogyakarta, Jumat (12/7/2019).

Perlu diketahui, produksi hortikultura Indonesia tercatat terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan catatan BPS, sepanjang 2018, produksi buah-buahan mencapai 21,5 juta ton, sayuran 13 juta ton, tanaman hias 870 juta tangkai dan tanaman obat mencapai 676 ribu ton. Kinerja volume ekspor hortikultura pada 2018 mencapai 435 ribu ton, naik 10,36 persen dibanding pada 2017 sebanyak 394 ribu ton.

Sekjen Asosiasi Perbenihan Indonesia (Asbenindo) Nana Laksana Ranu mengaku salut dengan gebrakan yang dilakukan Mentan Amran untuk melecut ekspor komoditas pertanian, khususnya hortikultura. Awalnya, dalam sebuah pertemuan di Jakarta, sekitar 10 eksportir menyampaikan keluhan kepada Mentan terkait waktu perizinan ekspor yang dianggap masih lama, sehingga berpotensi melemahkan daya saing ekspor produk pertanian.

Meski demikian, saat itu juga Mentan langsung memberikan solusi konkret berupa pemangkasan waktu pengurusan surat izin ekspor di Kementan dari 312 jam alias 13 hari, menjadi hanya tiga jam selesai secara online. Kebijakan tersebut diakui Nana Laksana dan para pelaku usaha ekspor pertanian sebagai solusi cerdas dan jitu.

"Pasca-pemangkasan waktu di Kementan tersebut langsung memberikan efek domino bagi pengurusan izin di instansi lainnya, sehingga izin keluarnya bisa ikut lebih cepat. Kementan sukses menjadi pionir kemudahan pengurusan izin di sektor hulu," kata Nana di Jakarta, Rabu (3/7/2019).

Apalagi, sambung, Mentan Amran berani menyatakan komitmen untuk bersikap proaktif datang melayani eksportir. Istilahnya jemput bola dan mendorong aktif para eksportir. "Ini kan luar biasa. Dampak langsung dari kebijakan tersebut adalah kenaikan ekspor benih hortikultura yang tinggi," sebutnya.

"Setidaknya ada 159 jenis benih tanaman hias yang sudah diekspor ke 27 negara antara lain Australia, Jepang, Amerika Serikat, Belanda, Korea, Kuwait, Singapura, Kanada dan sebagainya," pintanya.

Di lain pihak, kebijakan ekspor yang dikeluarkan Mentan Amran berdampak besar terhadap buah durian lokal. Pilihan konsumsi durian di dalam negeri saat ini semakin bergeser. Setidaknya bisa dilihat dari tren membanjirnya durian lokal mengalahkan durian impor. Dulu, para penjual buah durian segar di kios atau

lapak pinggir jalan lebih banyak yang menjual durian impor, kini durian lokal lebih mendominasi. Bahkan jika dulu gerai-gerai supermarket hampir tidak pernah memajang durian lokal, kini sudah mulai ramai menjual durian unggul lokal.

Ketua Yayasan Durian Nusantara (YDN) Mohamad Reza Tirtawinata memuji keberhasilan program Mentan Amran membangkitkan kejayaan durian lokal. Alhasil, kebijakan tersebut mampu membalikkan neraca perdagangan durian yang selama bertahun-tahun defisit menjadi surplus pada 2018. "Ini awal yang luar biasa bagus, boleh dibilang prestasi petani durian seluruh Indonesia pada umumnya dan Kementan pada khususnya," ujarnya di Jakarta, Selasa (9/7/2019).

Ia menjelaskan, hal ini terwujud karena perhatian Mentan Amran terhadap pengembangan durian lokal sangat tinggi. Kebijakan pacu ekspor terbukti efektif bangkitkan pamor durian lokal.

Dongkrak Daya Saing

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementan memfasilitasi pelaku usaha peternakan UMKM atau Unit Pengolahan Hasil (UPH) Peternakan di pameran peternakan Indo Livestock Expo & Forum 2019 untuk promosi ekspor. Pelaku usaha besar dan UMKM/UPH peternakan didorong agar dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas produk peternakan yang dimilikinya untuk bersaing di pasar Internasional. Hal ini disampaikan Dirjen PKH Kementan I Ketut Diarmita.

Untuk itu, Ketut menyebutkan, Kementan memfasilitasi pelaku usaha peternakan pada dua Paviliun yakni Paviliun Livestock Export dan Paviliun UMKM/UPH pada pameran Indolivestock tahun ini. Ajang ini dapat menjadi wadah komunikasi pelaku usaha besar maupun UMKM/UPH peternakan yang mungkin kedepan dapat menjalin kerjasama dalam mengembangkan usaha mereka. "Paviliun UMKM/UPH Peternakan ini diharapkan dapat memperkenalkan produknya kepada masyarakat luas dan memperluas jangkauan serta jaringan pemasaran sehingga siap bersaing di dunia internasional," kata Ketut.

Fini Murfiani, direktur Pengolahan dan Pemasaran Produk Peternakan menyampaikan bahwa terdapat 13 UPH Peternakan yang berasal dari Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, DI. Yogyakarta, dan Riau yang berpartisipasi pada Paviliun UMKM/UPH dan mempromosikan berbagai aneka produk olahan pangan dan non pangan seperti susu pasteurisasi, yogurt, susu kambing bubuk, rendang sapi, rendang domba, gulai domba, kornet sapi, kornet domba, bebek goreng, telur asin, telur organik, telur omega, tahu bakso, sabun susu, kerajinan tanduk, aksesoris sapi, dan pakan ternak. **(tim humas)**

GENJOT **DEVISA**, SEJAHTERAKAN PETANI

SETIAP bulan, Indonesia selalu melakukan ekspor hasil pertanian ke berbagai negara. Selain menggenjot neraca perdagangan untuk meraup devisa lebih banyak, kebijakan yang digulirkan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman juga untuk mensejahterakan petani. Belum lama ini, Kementan kembali melepas ekspor bawang merah ke Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand sebanyak 1.000 ton dan jahe ke Bangladesh sebanyak 500 ton di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (16/7/2019).

Pelepasan ekspor ini dilakukan Dirjen Hortikultura Suwandi. Hadir Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, Yasid Taufik, dan para eksportir.

Suwandi mengatakan, ekspor ini merupakan salah satu bukti nyata kebijakan pangan Mentan Amran untuk terus berkomitmen mewujudkan kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani serta menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional melalui ekspor.

Untuk tanaman hias, Suwandi mengatakan, berdasarkan data BPS, ekspor tanaman hias Januari-Mei 2019 mencapai 1.903 ton, sehingga naik 27 persen dibandingkan Januari hingga Mei 2018 yang hanya 1.494 ton. Kemudian, usaha budidaya tanaman hias di Kabupaten Bogor meraup puluhan miliar dari penjualan melalui ekspor. "Sesuai arahan Mentan, mulai 2018 kami fokus tingkatan volume ekspor. Salah satunya ekspor tanaman hias," ujarnya saat mengunjungi PT Monfori Nusantara, perusahaan budidaya sekaligus eksportir tanaman hias di Bogor, Kamis (18/7/2019).

Di lain tempat, Kementan melalui Karantina Pertanian Yogyakarta melepas ekspor 50 ton kulit kayu manis berbentuk stik kering dan pecahan kering (chipped) dengan nilai ekonomi Rp3,36 miliar ke Prancis dan Amerika Serikat (AS). "Ini merupakan bagian dari kebijakan strategis Kementan dalam mendorong ekspor, menambah ragam komoditas misalnya berupa produk jadi, minimal setengah jadi," kata Ali Jamil, kepala Badan Karantina Pertanian (Barantan) saat melepas ekspor di Yogyakarta, Selasa (30/7/2019).

Sebelumnya pada Selasa (16/7/2019), Barantan juga melepas Rp2,98 miliar komoditas pertanian olahan asal Jawa Timur (Jatim). "Kami mendorong para eksportir agar tidak lagi mengekspor komoditas mentah ke luar negeri. Olah dahulu minimal menjadi barang setengah jadi agar komoditas pertanian tersebut memiliki nilai tambah," ujar Jamil di Surabaya.

Potensi ekspor sarang burung walet ke Tiongkok

juga mengalami peningkatan drastis sejak dibukanya kran ekspor langsung oleh pemerintah. Kesepakatan bersejarah yang terjadi pada 2015 itu benar-benar berdampak bagi arus ekspor produk ini. Data Kementerian Perdagangan menunjukkan pada 2018, nilai total ekspor produk ini ke Tiongkok tercatat USD 139,82 juta, dan naik drastis 30,62 persen dalam lima tahun terakhir. "Indonesia diketahui menguasai 71 persen pasar sarang burung walet dunia, namun yang masuk ke Tiongkok masih sedikit. Masih banyak lewat negara lain," jelas Mulyanto, ketua umum Perkumpulan Eksportir Komoditas Indonesia Tiongkok (PEKIT) di Jakarta, Rabu (24/7/2019).

Staf Ahli Menteri Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional Kementan Banun Harpini mengajak para pelaku usaha sarang burung walet (SBW) untuk meningkatkan kualitas produksinya dan potensi ekspor nasional. "Kita tahu potensi sarang burung walet kita sangat luar biasa. Indonesia adalah pemasok terbesar pasar global, bahkan sampai 78 persen," ujar Banun dalam Focus Group Discussion di Hotel Salak Bogor, Jumat (26/7/2019).

Di tempat terpisah, Atase Pertanian Indonesia Sri Nuryanti menerima perusahaan importir Jepang Great Giant Foods (GGF) Ltd yang berniat mengimpor buah segar asal Indonesia. Rencana tersebut disampaikan berdasarkan pangsa pasar yang besar di Jepang.

"Kami telah meminta Pemerintah Jepang menambah kuota ekspor pisang dan nanas menjadi 10 ribu ton dan 8 ribu ton per tahun," ujarnya di Tokyo, Jepang, Minggu (7/7/2019).

Menurut Nuryanti, meski masih dalam proses, permintaan itu cukup besar peluangnya mengingat saat ini Jepang juga tertarik untuk mengimpor aneka buah asal Indonesia, salah satunya alpukat.

Sedangkan ekspor produk pertanian ke Tiongkok selama 2014-2018 meningkat tajam. Bahkan, angkanya sampai 33,63 persen atau rata-rata 9,27 persen per tahun. "Artinya, dari 3,99 juta ton meningkat menjadi 5,34 juta ton," kata Kepala Pusat Data dan Informasi Kementan Ketut Kariyasa, Selasa (9/7/2019).

Sementara setelah penandatanganan protokol ekspor buah naga antara Indonesia dan China pada 29 April 2018 di Beijing. Pemerintah Tiongkok mengiriskan Tim The General Administration of Customs of The Peoples Republic of China (GACC) untuk melaksanakan verifikasi lapang. Indonesia menyiapkan detil kualitas dan kontinuitas sesuai dengan permintaan





pasar negara tersebut. Dengan demikian, peluang masuknya buah naga ke Negeri Tirai Bambu tersebut kian terbuka lebar.

Sedangkan ekspor buah nanas selama empat setengah tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan bahkan mencapai 31,27 persen atau rata-rata 8,65 persen per tahun. "Setiap tahun terus meningkat. Ini terlihat dari catatan 2013, dimana 174 ribu ton meningkat menjadi 229 ribu ton pada 2018," ujar Ketut Kariyasa, Jumat (26/7/2019).

Menurut Kariyasa, pangsa ekspor nanas juga lebih besar jika dibandingkan komoditas buah lain, yakni 41,36 persen terhadap total nilai ekspor produk hortikultura yang mencapai 84,48 persen.

Di lain pihak, Kementan bersama Pengurus Wilayah Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (PW LPPNU) Jatim sedang menjajaki pasar ekspor bunga Krisan ke Jepang. Dalam waktu dekat ini, LPPNU mengirim sampel bunga Krisan sebagai bahan yang akan diekspor ke negeri Sakura tersebut. "Tim LPPNU Jatim dan Kementan akan ke Jepang dengan membawa sampel Bunga Krisan dari Green House binaan. Permintaan sementara, per minggu mencapai 100 ribu per pekan. Semoga semuanya lancar dan deal, jika itu terjadi, maka itu angka yang besar dan tidak mungkin bisa terpenuhi dengan beberapa Green House saja," ujar Ghufron Ahmad Yani, ketua PW LPPNU Jatim di Surabaya, Rabu (10/7/2019). **(tim humas)**



FF

Dengan perjanjian tersebut, volume dan nilai perdagangan kedua negara dapat ditingkatkan secara signifikan dalam tahun-tahun yang akan datang,”

Andi Amran Sulaiman
Menteri Pertanian

PRESIDEN ARGENTINA **SAMBUT HANGAT** MENTAN AMRAN

Kedua Negara Hasilkan Kesepakatan



PRESIDEN Argentina Mauricio Macri menyambut hangat kehadiran Menteri Pertanian (Mentan) RI Andi Amran Sulaiman di Istana Kepresidenan, Buenos Aires, Senin (22/7/2019). Kunjungan Mentan ke Argentina ini merupakan tindak lanjut pertemuan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Mauricio di Istana Bogor pada 26 Juni 2019. Pertemuan kedua kepala negara itu membahas ekspor komoditas pangan Indonesia ke Argentina.

Mentan Amran menjelaskan, dalam pertemuan tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan kerja sama antara kedua di negara. Pertama, Pemerintah Argentina menyetujui Indonesia mengekspor mangga, pisang, manggis, nanas, dan salak. Pemerintah Argentina juga berkomitmen menambah volume ekspor CPO ke negaranya, sehingga pangsa pasar atau market share CPO Indonesia di Argentina akan meningkat. "Berikutnya, kedua negara sepakat untuk bekerja sama dalam pengembangan teknologi pertanian, yaitu dryer, silo, dan mekanisasi pengolahan hasil pertanian," bebernya usai pertemuan di Buenos Aires, Senin (22/7/2019).

Adapun persetujuan pengembangan teknologi pertanian tersebut akan diawali dengan penandatanganan perjanjian kedua belah pihak antara Mentan RI dan Menteri Agroindustri Argentina yang akan dilaksanakan di Jakarta pada September 2019.

Kesepakatan ketiga, lanjut Amran, kedua pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama perdagangan bidang pertanian yang saling menguntungkan dan seimbang. Karena itu, pemerintah kedua negara akan mendorong dan memfasilitasi sektor swasta untuk mewujudkan hal tersebut dalam waktu dekat. "Dengan perjanjian tersebut, volume dan nilai perdagangan kedua negara dapat ditingkatkan secara signifikan dalam tahun-tahun yang akan datang," tegas Amran.

"Yang jelas, kedua negara sudah berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama perdagangan bidang pertanian yang saling menguntungkan dan seimbang. Karena itu, kami akan mendorong dan memfasilitasi sektor swasta untuk mewujudkan hal tersebut. Dengan begitu, volume dan nilai perdagangan kedua negara dapat ditingkatkan secara signifikan," katanya.

Perlu diketahui, dalam kunjungannya ke Indonesia beberapa waktu lalu dan di hadapan Jokowi, Presiden Argentina Mauricio menyampaikan keinginan negaranya untuk meningkatkan kerja sama dengan Indonesia,

terutama di sektor pertanian. Dia pun bahkan mengharapkan Argentina dapat secepatnya mengimpor buah-buah dari Indonesia.

"Kami juga ingin menikmati buah-buah yang ada di Indonesia, begitupun Indonesia dapat belajar untuk bidang teknologi pertanian dari Argentina supaya bermanfaat untuk kedua belah pihak," jelas Mauricio.

Di lain pihak, Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertanian (Kementan) Ketut Kariyasa mengatakan, proses ekspor ini akan menambah deretan angka ekspor yang dilakukan pemerintah Indonesia selama empat setengah tahun terakhir. "Apalagi selama ini ekspor produk pertanian kita menunjukkan kinerja yang sangat membanggakan. Kita tahu pada 2013, ekspor kita masih sekitar 33,5 juta ton, tapi pada 2014 dan 2016 meningkat menjadi 36,1 juta ton dan 40,4 juta ton," katanya.

Kariyasa mengatakan, peningkatan ini juga terjadi pada 2017 dan 2018, dimana ekspor pada saat itu meningkat menjadi 41,3 juta ton dan 42,5 juta ton. Angka sebesar ini, jika dibandingkan pada 2013, jumlahnya meningkat lebih dari 9 juta ton atau 26,9 persen.

"Yang cukup menarik untuk diperhatikan bahwa selama periode 2014-2018, total volume ekspor pertanian mencapai 195,7 juta ton, sehingga ada akumulasi tambahan volume ekspor selama periode tersebut sekitar 28,3 juta ton," jelasnya.

Menurut Kariyasa, akumulasi tambahan volume ekspor ini jika ditotal angkanya mencapai 84,5 persen dari jumlah ekspor produk pertanian pada 2013 yang sebesar 33,5 juta ton. Disisi lain, nilai ekspor produk pertanian juga terus meningkat hingga Rp320,9 triliun pada 2013 dan Rp368,4 triliun dan Rp375,5 pada 2014 dan 2016.

"Nilai ekspor produk pertanian berlanjut meningkat pada 2017 dan 2018 menjadi Rp442,3 triliun dan Rp415,9 triliun. Artinya, selama 2014-2018, total nilai ekspor produk pertanian Indonesia mencapai Rp1.957,5 triliun," katanya.

Adapun untuk posisi ekspor produk pertanian Indonesia, saat ini masih didominasi komoditas perkebunan yang mencapai 91,4 persen. Meski demikian, kinerja ekspor Indonesia sangat ditentukan oleh kinerja produksi perkebunan saat ini. "Dalam upaya meningkatkan peran penting dan strategis sektor pertanian, maka, Kementan sudah menyiapkan program terobosan selama lima tahun ke depan melalui Program Bun500 yang diluncurkan Mentan pada 18 Juli di Palangkaraya, Kalteng," tukasnya.

(tim humas)



JOKOWI, KEMENTAN dan STRATEGI LOBI EKSPOR

BERBAGAI cara dilakukan pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan), termasuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam mendorong ekspor hasil pertanian dalam negeri ke negara lain.

Seperti yang dilakukan Presiden Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini punya cara baru yang unik untuk menjamu tamu kenegaraannya di Istana Kepresidenan. Apa? Yaitu dengan menyajikan buah tropis khas Indonesia. Manuver ini juga bisa membuka peluang ekspor hortikultura langsung ke negara tersebut.

Seperti terlihat saat Jokowi menjamu Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan di Istana Bogor, Rabu (24/7/2019). Sheikh Mohamed disuguhi salak dan durian saat Verranda Talk dengan Jokowi di Istana.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno L.P. Marsudi yang mendampingi Jokowi mengungkapkan, Putra Mahkota sangat terkesan dengan jamuan buah tropis tersebut. "Jadi tadi (Sheikh Mohamed, red) tanya ini apa? Oh ini namanya salak. Terus ada manggis, kemudian durian," tuturnya.



Jamuan buah tropis ini bukanlah hal yang pertama dilakukan Jokowi. Beberapa saat sebelumnya, Presiden Argentina Mauricio Macri dan Ibu Negara Juliana Awada, bahkan langsung mengutarakan keinginan mereka untuk secepatnya mengimpor buah-buahan dari Indonesia. Jamuan ini bisa menjadi sebuah peluang ekspor yang dibuka Jokowi untuk petani hortikultura Indonesia guna melebarkan sayap mereka ke pasar ekspor. Data Ditjen Hortikultura secara keseluruhan, kinerja ekspor buah, sayuran dan bunga-bunga Indonesia pada 2018 cukup menggembirakan dengan kenaikan 12 persen, dengan nilai Rp5 triliun lebih. Ekspor sayuran naik 4,8 persen, bunga tujuh persen, dan buah-buahan 26,3%. Adapun negara tujuan ekspor mencapai 113 negara.

Di lain pihak, Badan Karantina Pertanian (Barantan) Kementan telah menerapkan sistem pertukaran data pada pengiriman sertifikasi kesehatan baik hewan dan

tumbuhan sebagai persyaratan negara tujuan ekspor. Elektronik sertifikat atau e-Cert ini menyertakan seluruh data perlakuan karantina untuk jaminan dan kesehatan produk pertanian yang dilalulintaskan. "Otoritas karantina masing-masing negara sudah saling percaya dengan pemenuhan standar dan juga teknologi yang saling support," kata Edhy Prabowo, ketua Komisi IV-DPR RI saat memberi keterangan dari kunjungan kerjanya di Amsterdam, Belanda pada Rabu (24/7/2019).

Dia menyampaikan apresiasinya atas layanan digital yang disiapkan Kementan ini sigap atas kemajuan zaman. Otoritas Karantina Belanda yang diwakili Benno Slot dalam kesempatan diskusi menyampaikan bahwa Komisi seluruh negara di Uni Eropa (UE) berencana memberlakukan sertifikasi elektronik pada akhir 2020.

Kepala Barantan Ali Jamil yang turut dalam rombongan Kunjungan Studi Diplomasi Anggota Komisi IV DPRI-RI ini menjelaskan bahwa saat ini baru ada empat negara



mitra dagang yang bekerja sama dalam e-Cert, yakni Belanda, New Zealand, dan Australia serta negara ASEAN yang sudah siap bergabung, Vietnam. Sementara negara mitra dagang lainnya masih dalam tahap proses negosiasi.

Sementara Ditjen Perkebunan menghadiri Sidang Senior Official Meeting Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) selama dua hari di Kuala Lumpur, Malaysia. Pertemuan ini bertujuan untuk membangun hubungan kerja sama yang lebih erat lagi antarnegara-negara penghasil minyak sawit. "Bagi Indonesia, pertemuan ini sangat penting sekali dan bisa memberikan kontribusi pada meningkatkan ekspor," ujar Sekretaris Ditjen Perkebunan Kementan Antarjo Dikin, Selasa (16/7/2019).

Selain itu, lanjut dia, CPOPC juga berpotensi besar pada peningkatan pendapatan petani sawit, pengentasan kemiskinan, membuka akses lapangan pekerjaan dan membuka peluang usaha lainnya.

Di acara berbeda, usai menghadiri Symposium International on Geographical Indications pada 2-4 Juli 2019 di Lisbon, Portugal, Antarjo melaporkan bahwa Indonesia perlu segera melakukan registrasi komoditas pertanian baik berupa produk setengah jadi maupun pangan olahan, yang merupakan produk Indikasi Geografis (IG). Simposium International on Geographical Indications dihadiri oleh 67 negara, empat komunitas internasional pemerintah (ASEAN, EU, ARIPO, AU) dan satu organisasi non-pemerintah.

"Apabila negara anggota telah melakukan registrasi dan memberikan perlindungan IG terhadap produk yang dihasilkan, berarti telah memberikan jaminan pasar internasional terhadap negara pembeli produk, menjaga keragaman bio-diversity (sustainable) karena produk spesifik yang dihasilkan berasal dari ekologi berbeda serta dapat berkontribusi memberikan perlindungan petani kecil karena umumnya produk IG relatif sangat terbatas jumlahnya," ujar Antarjo mengulang catatan penting yang disampaikan Direktur General (DG) World Intellectual Property Organization (WIPO) berkedudukan di Jenewa.

Di Hotel Novotel Bandar Lampung, Rabu (10/7/2019), Kementan memfasilitasi pertemuan the Working Group on



Agriculture, Food and Forestry Cooperation yang ke-22 (WGAFFC). Pertemuan bilateral yang melibatkan Pemerintah Indonesia dan Australia tersebut digelar untuk membahas isu-isu peternakan, hortikultura, dan perkarantinaan, serta merumuskan kerja sama teknis yang strategis dan konkret.

Secarak husus, Plt Sekjen Kementan Momon Rusmono meminta pihak Australia untuk memberikan akses pasar yang luas bagi komoditas hortikultura Indonesia

seperti pisang, nanas, mangga, salak, dan manggis untuk dapat masuk ke pasar Australia. "Fasilitasi akses pasar ini juga harus didukung kerja sama teknis dan 'capacity building' dari pihak Australia. Sehingga Australia tidak hanya membuka pasarnya untuk produk pertanian Indonesia, tapi melakukan kerja sama dalam peningkatan daya saing produk pertanian Indonesia," ungkapnya saat dimintai keterangan, Jumat (12/7/2019).
(tim humas)





SAATNYA DONGKRAK LUAS TANAM DI LAHAN RAWA

Ayo Petani, Jangan Takut Musim Kemarau

MUSIM kemarau memang menyebabkan kekeringan pada lahan petani. Namun di sisi lain, musim kemarau juga bisa menjadi momentum untuk meningkatkan Luas Tambah Tanam (LTT), terutama di wilayah yang banyak memiliki lahan rawa lebak.

Di beberapa wilayah Indonesia, dampak musim kemarau membuat tanaman padi milik petani mengalami puso atau gagal panen. Data menyebutkan, luas tanam padi yang terkena kekeringan selama periode Januari-Juni 2019 sekitar 20.964 hektare (ha) atau hanya 0,28 persen dari total luas pertanaman sebesar 7.359.453 ha. Dari jumlah yang kekeringan itu, lahan padi yang puso (rusak parah) hanya 0,003 persen atau 232 ha. Wilayah yang terkena kekeringan tersebar di 14 provinsi per wilayah.

Dibandingkan dengan periode Januari-Juni 2018, luas lahan padi yang kekeringan tersebut lebih rendah sekitar 78,18 persen. Begitu pun dengan puso selama periode Januari-Agustus 2019 lebih rendah 98,74 persen dibandingkan periode Januari-Juni 2018.

Sementara kekeringan pada musim kemarau (MK) April-September 2019 juga masih lebih rendah 75,87 persen dibandingkan MK April-September 2018.

Demikian juga yang puso pada MK April-September 2019 lebih rendah 98,94 persen dibandingkan MK April-September 2018. "Saat ini yang mengalami kekeringan serius ada lahan pertanian di Jawa, Bali, Nusa Tenggara. Berdasarkan data BMKG, luas lahan yang terkena kekeringan sekitar 102 ribu ha dan puso 9 ribuan ha," ujar Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Sarwo Edhy, Selasa (9/7/2019).

Sementara kesiapan petani dalam Program Serasi (Selamatkan Rawa, Sejahterakan Petani) menjadi salah satu kunci sukses program tersebut. Karena itu untuk memastikan petani yang akan mengelola lahan rawa, pemerintah melalui Ditjen Tanaman Pangan dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian bersama-sama melakukan penyiapan dokumen dan data gapoktan terkait Program Serasi tersebut.

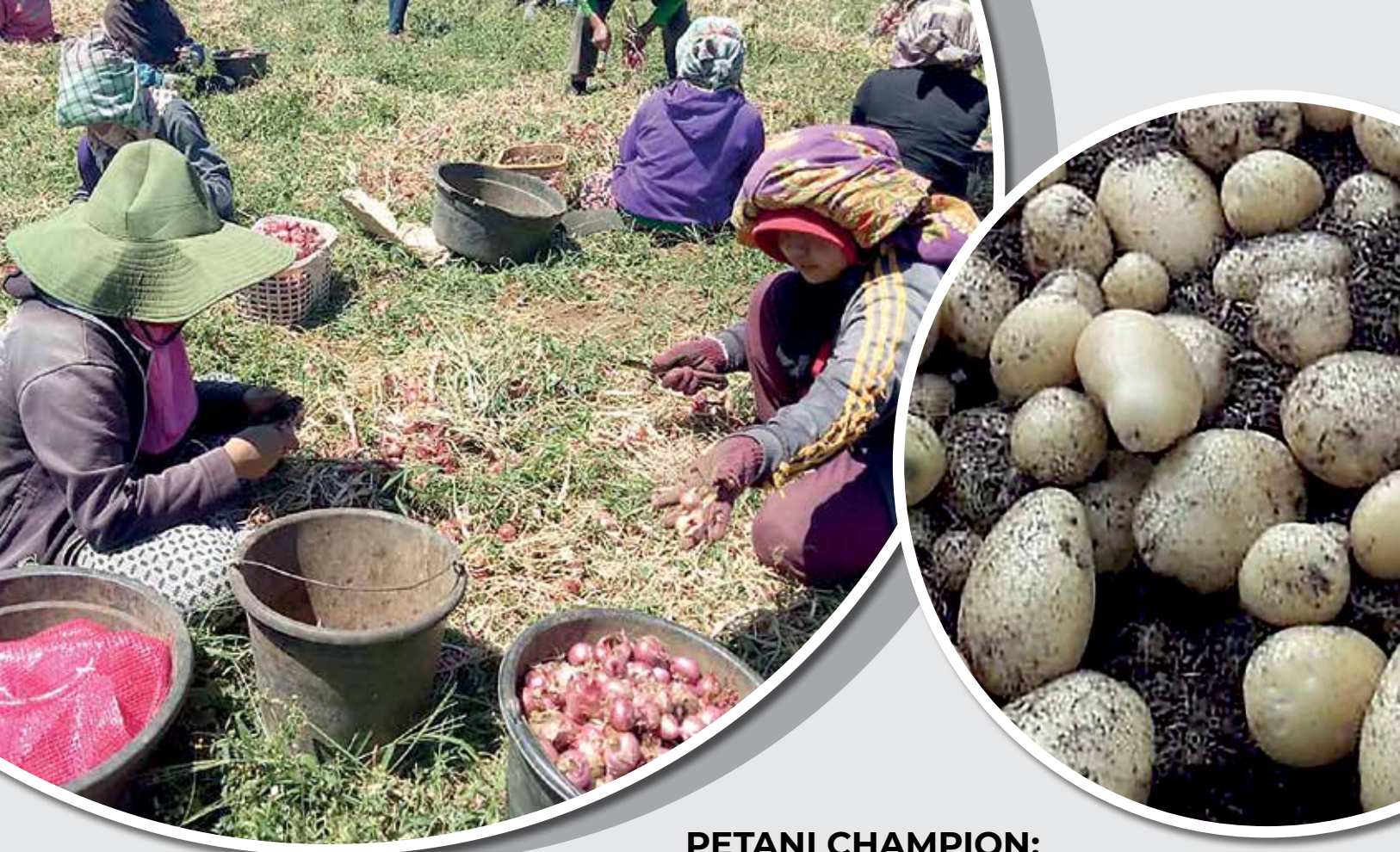
Bahkan Dirjen Tanaman Pangan Sumardjo Gatot Irianto beberapa waktu lalu menyaksikan langsung proses pelaksanaan kegiatan pemberkasan dokumen terkait data-data usulan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) yang tergabung dari beberapa desa di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel). Serasi dilaksanakan dalam rangka peningkatan produktivitas dan pendapatan petani dengan target seluas 500 ribu ha. Pada tahap awal akan dilakukan di Sumsel seluas 220.000 ha, Kalimantan Selatan 153.363 ha dan Sulawesi Selatan 33.505 ha.

Ketua Gapoktan Tunas Karya, Mustadi dari Desa Upang Kecamatan Air Salek, Kabupaten Banyuasin mengakui merasakan manfaat

program pengembangan lahan rawa ini. Sebelum 2015 dirinya dan petani lainnya hanya bisa menanam padi satu tahun sekali, tapi kini bisa menanam dua kali.

Di lain pihak, Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Infrastruktur Pertanian Prof Dedi Nursyamsi menekankan pentingnya pembenahan tata kelola air makro maupun mikro untuk menunjang produktivitas pertanian di lahan tidur seperti rawa dan lebak. "Pembenahan ini harus dimulai dari perbaikan infrastruktur seperti normalisasi saluran primer, sekunder, tersier, kuartar, sertaperbaikapintu air, gorong-gorong, border, dan lain-lain," ujarnya saat membuka Fokus Group Diskusi (FGD) Tata Kelola Infrastruktur Pertanian II di Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa (Balittra), Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Selasa (23/7/2019). **(tim humas)**





PETANI CHAMPION: **TERIMA KASIH PAK AMRAN!**

PETANI Champion bawang menilai budidaya bawang merah dan bawang putih di era Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman sangat berpihak kepada kepentingan petani. Pasalnya, gebrakan Mentan Amran tidak hanya fokus pada peningkatan produksi, tapi juga berani memasukan importir nakal dalam kotak hitam yang menjadi ganjalan petani menikmati untung.

"Terima kasih Pak Mentan Amran! Berani dan sukses blacklist 74 importir bawang nakal. Kami tidak lagi bergantung pada permainan importir nakal, sehingga kami merasakan hasil yang bagus dan untung," ujar Tunov Mondro Atmojo, petani champion sekaligus mitra kerja importir yang melaksanakan wajib tanam bawang putih di Magelang, Jawa Tengah (Jateng), Selasa (2/7/2019).

Ia menjelaskan, selama lebih dari 23 tahun nasib bawang putih lokal terbengkelai akibat gempuran impor. Meski demikian, hanya kurun waktu 2 tahun terakhir, komoditas bawang putih mampu dibangkitkan kembali. "Sentra-sentra bawang putih yang dulu pernah berjaya, kini kembali bergeliat bangkit," akunya.

Strategi Kementan menyusun peta jalan swasembada bawang putih 2021 menunjukkan tekad serius menjadikan Indonesia lumbung pangan dunia. "Peta

jalan swasembada bawang putih itu tentu saja kabar bahagia untuk kedaulatan pangan kita. Apalagi waktunya sebentar lagi," ujar Suwardi, pengamat pertanian IPB, Selasa (2/7/2019).

Dia menuturkan, peta jalan swasembada bawang putih 2021 akan memberikan kepastian pangan nasional ke depannya. Sebab, bawang putih selama ini diketahui jadi komoditas pangan yang kerap menuai masalah, seperti harga, ketersediaan maupun waktu impornya.

Wakil ketua Komisi 4 DPR-RI Viva Yoga Mauladi mendukung upaya Kementan untuk menuju swasembada bawang putih 2021. "Sekarang saja lebih dari 96 persen bawang putih kita impor dari China, India dengan nilai impor mencapai Rp 7 triliun. Padahal lahan Indonesia luas dan kita pernah swasembada bawang putih di era 90-an" ungkapnya prihatin. "Meskipun volume masih kalah dengan impor, tapi aroma bawang lokal lebih maknysus," tandasnya di sela panen bawang putih di Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, NTB.

Di lain pihak, Ketua Asosiasi Penangkar Benih Kentang Jawa Barat (Jabar) Aceng Hasan Muttaqien mengaku terkesan dengan cara kerja dan strategi Mentan



Amran Sulaiman dalam mengembangkan agribisnis kentang di tanah air. Gebrakan-gebrakan Mentan memacu produksi dan ekspor diakui banyak memberi dampak positif bagi para petani dan penangkar kentang di dalam negeri. "Kami sangat berterima kasih kepada Pak Menteri Amran Sulaiman dan jajarannya, yang berani stop impor kentang sayur termasuk benihnya. Kebijakan cerdas dan strategis tersebut membuat para pelaku perbenihan kentang di tanah air menjadi semakin bergairah. Petani juga lebih mudah mendapatkan benih dengan harga terjangkau. Dampaknya tentu saja produksi nasional meningkat," demikian ditegaskan Hasan di Bandung, Jumat (5/7/2019).

Sementara itu, para petani cabai di Desa Nitikan dan Pacalan Kecamatan Plaosan Magetan, Jateng akhirnya bisa bernafas lega. Berkat kesigapan tim yang diterjunkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Hortikultura Kementan, bersama Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Timur, Dinas Pertanian Magetan, Petugas Pengawas Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) dan PPL setempat berhasil mengidentifikasi akar penyebab serangan penyakit terhadap tanaman cabai di daerah tersebut.

"Arahan Mentan memang kita semua harus gerak cepat terjun lapangan, sigap ke petani, kapanpun dan dimanapun, karena petani kerja juga tidak kenal hari libur," ujar Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Hortikultura Moh Ismail Wahab di Jakarta, Selasa (2/7/2019).

Sujono, ketua Kelompok Tani Niti Mulyo Sujono menyayangkan pemberitaan sebelumnya yang tidak sesuai fakta. Padahal lahan terserang tersebut, luasnya sempit yakni hanya ribuan meter saja, terserang karena tanaman apkir. "Yang diberitakan itu tidak jelas, lahan tanaman siapa, yang diwawancara juga beda, yang masuk berita nama petani juga beda," kata Sujono.

Perlu diketahui, dalam pemberitaan dan media sosial (medsos) belum lama ini, tertulis nama petaninya Tukiran, padahal yang benar petani yg diwawancarai bernama Sarkan. Padahal, Sarkan bukan petani tapi pekerja di lahan milik orang lain. "Lahan yang di medsos itu milik Agus. Luas lahan 2.500 meter dengan jumlah tanaman 4.500 batang, kok di medsos simpang siur gitu ya," ucap Sujono.

Koordinator POPT Kabupaten Magetan Sumarlan mengatakan, hasil pengamatan yang dilakukan pihaknya di desa tersebut, serangan virus terhadap tanaman cabai prosentasenya sangat rendah dan tidak sampai meluas. Faktanya tak lebih dari satu yang terserang virus, hanya pada luasan 0,2 hektare (ha) atau sekitar 3.400-an batang cabai keriting.

Di lain pihak, pertanaman cabai merah besar atau dikenal dengan Cabai TW dapat ditanam di lahan dataran rendah, medium hingga dataran tinggi. Varietas Cabai TW yang banyak ditanam para petani

di antaranya Imola, Gada, dan Tanjung. Pertanaman di dataran tinggi sebagian besar hanya mengandalkan tadah hujan, sehingga saat musim kemarau banyak lahan cabai yang terkendala kekurangan air. Namun, bagi petani yang memiliki sarana irigasi seperti sprinkle masih tetap bisa menanam cabai meski memasuki musim kemarau. Terlebih untuk lahan yang berada di dataran rendah, produksi berlangsung relatif normal.

Ketua Paguyuban Petani Cabai di Kediri, Suyono saat dihubungi (1/7/2019) menyebut beberapa kawasan produksi cabai TW terutama di dataran tinggi, pertanaman cabai tampak layu karena kekurangan air. Menurutnya, untuk sentra produksi di dataran rendah, rata-rata sedang mulai belajar berbuah, sehingga produksi masih sedikit.

Di sisi lain, pergerakan harga cabai merah keriting dan cabai rawit merah dalam dua minggu terakhir ini masih cukup tinggi. Berdasarkan pantauan di portal Info Pangan Jakarta per 5 Juli 2019, rerata harga cabai merah keriting Rp 63.000/kg dan cabai rawit merah Rp 59.000/kg.

Nah guna meredam dan mengendalikan harga cabai, Toko Tani Indonesia Centre (TTIC) Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan respon cepat dengan menggelar Pasar Cabai Murah melalui di TTIC Pasar Minggu Jakarta dan TTIC di Jalan Tentara Pelajar No 1 Bogor, serta di 30 outlet Toko Tani Indonesia (TTI) yang tersebar di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang. "Gelar Pasar Cabai Murah melalui TTIC/TTI ini merupakan respon cepat yang kami lakukan, karena melihat ada kecenderungan harga cabai merah yang masih tinggi. Melalui gelar pasar murah ini, diharapkan harga cabai bisa turun dan kembali normal," ujar Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementan Agung Hendriadi saat melakukan pelepasan Gelar Pasar Cabai Murah di TTIC, Pasar Minggu Jakarta Selatan, Minggu (7/7/2019).

Terkait bawang merah dan ikan lele, kebijakan Mentan Andi Amran Sulaiman dalam meningkatkan inovasi demi menghasilkan komoditas yang berkualitas dan berdaya saing serta petani semakin sejahtera turut memotivasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk dan petani dalam merubah metode budidaya bawang merah. Petani di Nganjuk, Jawa Timur memakai metode budidaya yang unik dalam membudidayakan bawang merah, yakni dengan menggabungkan usahatani bawang merah bersamaan dengan budidaya ikan lele.

Petani setempat menyebutnya Metode Bamele alias Bawang Merah dan Lele. Hasilnya luar biasa, petani bisa menikmati keuntungan ganda, sebab keuntungan tidak hanya dari hasil bawang merah, tapi juga dari panen lele. Susanto, petani asal Dusun Padangan Desa Banaran Kulon, Kecamatan Bagor, Nganjuk merupakan salah satu petani yang mencoba teknik Bamele di lahan bawang merah miliknya. Ia mengaku tujuan awal Bamele tersebut selain meningkatkan pendapatan petani, juga mengajak petani berbudidaya yang sehat dan ramah lingkungan. **(tim humas)**

DI SELA kunjungannya ke Sumatera Utara (Sumut) pada Rabu (31/7/2019), Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Ibu Negara melakukan kunjungan ke Desa Parsingguran, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan untuk meninjau pengembangan peternakan dan pertanian,

Kepala negara meninjau proyek percontohan pengembangan ternak sapi berjenis belgian blue yang merupakan bantuan dari Kementerian Pertanian (Kementan). Jenis sapi tersebut dapat dikatakan sebagai jenis baru di Indonesia dan diharapkan dapat menjadi bibit unggul bagi pemenuhan kebutuhan daging nasional di masa mendatang. "Ini sapi baru tiga hari datang. Ini juga diajari Menteri Pertanian (Mentan Andi Amran Sulaiman, red). Ini baru tiga. Biar nyoba, tapi tadi ditanya sapinya katanya senang. Oke, berarti tambah lagi," ujar Jokowi.

Perlu diketahui, sapi belgian blue tersebut memiliki bobot 1,5 ton apabila dternakkan dengan baik. Karena itu, Presiden Jokowi berencana jika proyek percontohan di Desa Parsingguran ini berhasil, maka proyek-proyek serupa akan turut dikembangkan di daerah lainnya. "Digedein dulu, nanti kalau betul-betul produktif, bisa menjadi contoh. Tinggal kopi (diulang, red) ke tempat lain gampang," ucapnya.

"Karena di Humbang Hasundutan mungkin dikembangkan lagi, di Karo dikembangkan lagi, di Tapanuli Utara kembangkan lagi," tandas presiden.

Selain itu, Presiden Jokowi dan rombongan juga meninjau lahan pertanian yang juga

Sapi Belgian Blue, Bawang Putih, dan Jeruk

Presiden **JOKOWI** Tinjau Pertanian SUMUT

dikembangkan di desa tersebut, yakni budidaya bawang putih yang dikembangkan Kementan pada akhir 2018. Budidaya bawang putih yang dilakukan saat itu, mampu menghasilkan lebih kurang 16,4 ton per hektare (ha). Dengan hasil tersebut diharapkan budidaya bawang putih dapat dikembangkan lebih serius di desa tersebut. "Kita harapkan paling tidak bawang putih, tidak usah untuk suplai nasional, tapi untuk suplai Sumut saja itu sudah mengurangi impor banyak sekali," ucap Jokowi.

Hasil komoditas budidaya lainnya yang juga sempat dicicipi Presiden Jokowi dari desa tersebut adalah jeruk yang baru saja dipanen. "Tadi saya nyoba jeruk, segar banget rasanya karena memang udaranya cocok, tanahnya cocok," tuturnya.

Dari tempat tersebut, mantan Wali Kota Solo itu langsung menuju Bandara Internasional Silangit di Kabupaten Tapanuli Utara untuk kemudian lepas landas menuju Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta. **(tim humas)**



KIAN SEJAHTERA, Kemiskinan Desa Turun Drastis

KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) melalui berbagai unit kerjanya terus memfokuskan diri pada program strategis yang berkaitan langsung dengan penurunan angka kemiskinan. Salah satunya dengan mengimplementasikan Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja).

Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) Kementan Ketut Kariyasa menjelaskan, program tersebut merupakan program bantuan langsung berupa paket ternak ayam kampung atau kambing dan sayur mayur atau komoditas komersial lain yang bisa ditanam di lahan sempit pekarangan.

Paket bantuan ini, lanjut dia, diberikan kepada setiap Rumah Tangga Petani Miskin (RTM) untuk dikelola menjadi sumber pendapatan utama. Selain Program Bekerja, Kementan juga terus menggenjot produksi pangan strategis untuk meningkatkan ketersediaan pangan dan produksi dalam negeri, termasuk juga membenahi rantai pasok dan distribusinya agar harga pangan tetap stabil sampai di tingkat konsumen. "Ini penting dilakukan karena menurut data BPS pada 2018, komponen makanan masih menyumbang sebesar 73,48 persen kepada pembentukan garis kemiskinan. Sementara sisanya 26,52 persen disumbang oleh komponen non-makanan," ujar Kariyasa.

Pada Maret 2019, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis bahwa angka kemiskinan Indonesia hanya 9,41 persen atau setara dengan 25,14 juta orang. Angka tersebut turun drastis dan signifikan hingga 9,41 persen dari angka awal periode September sebesar 9,66 persen.

Di lain pihak, pada Selasa (2/7/2019), BPS juga merilis harga yang diterima petani (LT) meningkat sebesar 0,15 persen. Meski kondisi ini berdampak langsung pada Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTP), namun dampak tersebut hanya berkisar 0,28 persen atau penurunan NTP hanya 103,33 persen. "Penurunan NTP nasional disebabkan indeks harga yang diterima petani (LT) meningkat sebesar 0,15 persen. Tapi ini terjadi hanya pada Juni," ujar Suhariyanto, kepala BPS, Selasa (2/7/2019).

Menurut dia, angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan kenaikan indeks harga yang dibayar petani (LB), yakni sebesar 0,43 persen. Padahal angka secara nasional pada bulan Juni ini naik sebesar 0,15 persen. Pun dengan LT pada bulan Mei 2019, saat itu angkanya naik 139,79 persen dari angka awal 139,58 persen. Di sisi lain, Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) posisinya naik 0,06 persen. Kondisi ini berdampak baik pada kesejahteraan petani di daerah. "Kenaikan LT pada Juni 2019 disebabkan kenaikan LT di tempat subsektor pertanian, yaitu subsektor tanaman pangan sebesar 0,24 persen, hortikultura 0,76 persen, peternakan 0,44 persen dan perikanan 0,58 persen," katanya.

Terkait target pengembangan 1.000 desa pertanian organik yang sejalan dengan Program Go Organic yang dicanangkan Kementan

sejak 2010. Salah satu unit kerja pelaksana pengembangan desa organik, Kementan melalui Ditjen Hortikultura telah mengalokasikan Desa Pertanian Organik di 250 desa dan 24 provinsi. Secara perdana, Nagari Balai Panjang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat dipilih menjadi lokasi peresmian Desa Organik.

Direktur Perlindungan Hortikultura Sri Wijyantie Yusuf sangat mendukung semangat para petani mengembangkan pertanian organik di wilayah ini. "Dengan melihat keindahan alam Sumbar ini, kami merasa perlu terus menjaga keberlangsungan alam ini," ujarnya di Sumbar, Rabu (24/7/2019).

Di tempat terpisah, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng) tidak hanya berpotensi dalam hal pertambangan, Kabupaten yang dikenal hingga mancanegara sebagai lumbung nikel ini, ternyata juga punya potensi sebagai lumbung pangan organik pertama di Sulteng. Ini diungkapkan Bupati Morowali Taslim saat berkunjung ke Kantor Pusat Kementan Jakarta, Senin (15/7/2019). "Kami ingin mencoba mewujudkan mimpi menjadikan Morowali sebagai kabupaten organik pertama di Sulteng, terutama untuk komoditas padi" tandasnya.

Cerita Petani Muda

Seorang pemuda bernama San sukses menjadikan pertanian sebagai ladang uang. Lelaki 26 tahu lulusan Agronomi dan Hortikultura Institut Pertanian Bogor (IPB) ini membuka mata banyak anak muda terhadap profesi tani yang sangat menjanjikan. "Saya mengelola delapan hektare (ha) lahan milik pribadi serta 70 ha lahan milik PTPN VIII bersama 243 petani di Kabuten Cianjur, Jawa barat," ujarnya dalam acara Kick Andy, Jumat (26/7/2019).

San mengaku ingin mengajak anak muda untuk menerapkan manajemen bisnis pertanian on farm dan off farm. Ia percaya bahwa kerja keras dan manajemen yang baik akan mendatangkan kesuksesan. "Alhamdulillah saya sudah mampu mempekerjakan 50 staf di on farm maupun off farm, kemudian memperoleh omzet bulanan yang menggiurkan, juga telah mengirimkan produk ke modern market seperti perusahaan retail dan restoran, catering," katanya. (tim humas)





Beragam Varietas Benih,

KEMENTAN-BELANDA

RANCANG PROYEK

INDUSTRI benih di Indonesia saat ini telah banyak mengeluarkan varietas benih sayuran yang sangat beragam. Karenanya, Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Ditjen Hortikultura dan Wageningen University Research (WUR) The Netherland merancang proyek kerja sama produksi dan manfaat pengembangan varietas benih sayuran. Proyek yang dibiayai Pemerintah Belanda ini akan melihat kemajuan pengembangan varietas benih sayuran yang telah banyak dikembangkan industri benih di Indonesia terhadap kesejahteraan petani.

Tim Research dari Belanda yang dipimpin Just Dengerink mengatakan, Indonesia memiliki contoh kasus pengembangan benih sayuran yang sangat bagus untuk diteliti. "Contohnya terkait beragamnya varietas tomat yang dihasilkan dan dipasarkan industri benih sejak 1992. Dahulunya tomat ditanam di dataran rendah, tapi saat ini sudah dikeluarkan varietas yang mampu beradaptasi di dataran tinggi," katanya saat bertemu Dirjen Hortikultura Suwandi di Jakarta, Senin (15/7/2019).

Suwandi berharap proyek ini dapat berjalan guna memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan industri perbenihan dan hortikultura di Indonesia.

Di lain pihak, untuk mendorong ketersediaan benih jagung, Kementan membangun pilot project pengembangan kawasan jagung hibrida (penangkaran benih) berbasis

korporasi petani. Direktur Perbenihan, Ditjen Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian, Takdir Mulyadi berharap kegiatan percontohan bisa merangsang kelembagaan ekonomi petani agar mengelola usaha penangkaran benih jagung hibrida secara mandiri. "Kegiatan percontohan ini juga dimaksudkan untuk membantu penyediaan benih jagung bersertifikat untuk wilayah tersebut dan dapat menumbuhkan kembangkan produsen benih jagung hibrida," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Jagung Nasional Fadel Muhammad mengapresiasi upaya pemerintah dalam menggenjot produksi jagung secara nasional. Ini merupakan capaian sekaligus bukti bahwa Indonesia adalah negara besar dengan posisi produksi di atas rata-rata.

"Saya kira kita semua patut mengapresiasi apa yang telah dibuat Mentan Amran. Beliau adalah orang yang keras dalam hal menegakkan aturan-aturan terhadap mereka yang bermain manipulasi," ujarnya dalam diskusi yang digelar Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rabu (3/7/2019).

Selain sayuran dan jagung, Kementan juga mengembangkan varietas jeruk. Kepala Badan Litbang Pertanian Fadry Djufry mengungkapkan, pihaknya memiliki koleksi Sumber Daya Genetik (SDG) Jeruk yang cukup besar. "SDG Jeruk itu menghasilkan benih pokok jeruk bebas penyakit yang dikelola Balitjestro



dan tersebar hampir di seluruh provinsi,” ujarnya dalam acara Bincang Asyik Pertanian Indonesia (Bakpia). bertema ‘Teknologi Bujangseta (Pembuaian Jeruk Berjenjang Sepanjang Tahun) untuk Peningkatan Produksi Jeruk Indonesia’, Jumat (19/7/2019).

Peneliti Jeruk Balijestro, Sutopo menjelaskan, dengan menggunakan Teknologi Bujangseta, tanaman jeruk bisa dipanen lebih cepat dan berbuah sepanjang tahun. Jika biasanya panen jeruk hanya dua kali dalam satu tahun, maka dengan teknologi itu petani bisa melakukan panen sepanjang tahun. “Jadi, dalam satu tahun bisa lima kali panen. Artinya, setiap dua atau tiga bulan bisa panen, sehingga ketersediaan buah sepanjang tahun tetap terjaga,” ujarnya.

Selain itu, budidaya jeruk lemon ternyata manis dan segar bagi petani. Jeruk ini bisa panen tiap minggu dan peluang pasar terbuka luas. Bahkan, kualitas lemon dalam negeri tak kalah dengan produk impor.

Pendiri Duta Farm, Sakir Nugraha mengakui bisnis hortikultura, khususnya jeruk lemon prospeknya cukup



cerah dan peluang pasarnya luas. Selama ini permintaannya cukup banyak, tapi produksi jeruk lemon dari petani belum mampu memenuhi tingginya permintaan tersebut. “Kita bisa mengisi pasar dalam negeri sebesar 20 persennya saja sudah cukup bagus,” kata Nugri, sapaannya.

Sementara itu, pasar jahe (Zingiber Offcinale) permintaannya juga tinggi. Selain dapat dikonsumsi sebagai bumbu masak, tanaman ini juga dibutuhkan sebagai bahan baku industri jamu, minuman instan dan komoditas ekspor. “Untuk memenuhi tingginya permintaan, selain menanam dalam kawasan hamparan, jahe bisa juga ditanam secara tumpang sari dengan komoditas pertanian lainnya seperti cabai, jagung manis dan kopi. Disamping itu, menanam dalam bagor atau karung bisa menjadi solusi,” ujar Kasubdit Tanaman Obat, Wiwi Sutiwi dalam bimbingan teknologi jahe dalam bagor (karung) di Semarang, Jawa Tengah pada akhir Juli 2019. **(tim humas)**



WUSSS... Akumulasi PDB Peternakan Melesat Rp18,2 Triliun



KINERJA peternakan tercatat mengalami peningkatan signifikan selama kurun waktu 2015-2018. Pada periode tersebut, pertumbuhan produksi daging meningkat sebesar 17,6 persen per tahun, susu 8,5 persen per tahun dan telur 17,5 persen per tahun. Ekspor produk peternakan pada periode yang sama juga meningkat 44,5 persen per tahun.

"Akumulasi peningkatan investasi dalam negeri usaha peternakan pada periode 2015-2018 juga meningkat Rp541,04 miliar. Sedangkan akumulasi PDB Sub Sektor Peternakan pada periode yang sama juga meningkat sebesar Rp18,2 triliun, dengan peningkatan dari 2017 ke 2018 sebesar 13,3 persen menjadi Rp155,15 triliun," ungkap Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan) I Ketut Diarmita mewakili Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman membuka Indolivestock 2019 Expo & Forum yang diselenggarakan pada 3-5 Juli 2019 di Grand City Convex, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (3/7/2019).

Kinerja membanggakan lainnya, yaitu terkait serapan tenaga kerja subsektor peternakan yang mengalami pertumbuhan sebesar 22,27 persen atau 1,04 juta

orang pada periode 2015-2018. Bahkan pada 2018, sektor peternakan berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 4.831.210 orang.

Untuk produk-produk hewan tertentu, berdasarkan data hasil rakor supply demand yang dipimpin Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pada 2018 Indonesia surplus daging ayam sebesar 517,8 ribu ton, dan telur ayam ras surplus 26,1 ribu ton. Secara keseluruhan, pembangunan pertanian pada 4 tahun terakhir juga menunjukkan capaian yang memuaskan.

Sementara itu, pemerintah terus menunjukkan keberpihakan terhadap pemerataan akses pembiayaan usaha kepada usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, secara kumulatif total akad untuk kredit usaha rakyat (KUR) dari Agustus 2015 sampai dengan 31 Mei 2019 sebesar Rp399,3 triliun dengan non-performing loan (NPL) sebesar 1,36 persen. "Ini menunjukkan bahwa kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet sangat kecil, dan jauh dari batas maksimal rasio kredit bermasalah atau NPL Bank Indonesia sebesar lima persen," jelas I Ketut Diarmita di



Akumulasi peningkatan investasi dalam negeri usaha peternakan pada periode 2015-2018 juga meningkat Rp541,04 miliar. Sedangkan akumulasi PDB Sub Sektor Peternakan pada periode yang sama juga meningkat sebesar Rp18,2 triliun, dengan peningkatan dari 2017 ke 2018 sebesar 13,3 persen menjadi Rp155,15 triliun.”

I Ketut Diarmita

*Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kementerian Pertanian (Kementan)*

ruang kerjanya, Jakarta, Rabu (17/7/2019).

Pada 2019, lanjutnya, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM telah menetapkan minimal sebesar 60 persen dari target penyaluran KUR pada 2019 sebesar Rp140 triliun diperuntukkan bagi sektor produksi. Capaian penyaluran KUR sektor produksi pada 2019 sampai dengan 31 Mei 2019 tercatat sebesar 43 persen dan sektor non produksi tercatat sebesar 57 persen, dengan realisasi KUR mencapai Rp65,9 triliun (47,1 persen dari target 2019) yang diberikan kepada 2.373.027 debitur yang terdiri dari KUR Mikro (65 persen), KUR Kecil (34,64 persen), dan KUR TKI (0,35 persen).

I Ketut Diarmita menambahkan, dukungan pemerintah terhadap usaha peternakan skala UMKM sangat besar untuk dapat mengakses KUR, khususnya untuk peternakan sapi dengan adanya KUR Khusus yang memungkinkan peternak mengakses pembiayaan untuk peningkatan skala usaha yang layak secara bersama dalam kelompok, dan dapat bermitra dengan perusahaan peternakan atau bidang lainnya sebagai penjamin pasar (off taker) dan atau penjamin kredit (avalis). **(tim humas)**



Inpago 11

Agritan

Varietas Terbaru

ANTI-KEKERINGAN

INPAGO-11

Musim kemarau menyebabkan sejumlah wilayah di Indonesia mengalami kekeringan sejak dua bulan terakhir. Akibatnya, banyak lahan persawahan mengalami kekeringan hingga terancam puso atau gagal panen pada musim tanam kedua ini.

Dalam upaya mengatasi permasalahan produksi padi di lahan kering, Balai Besar Penelitian Tanaman Padi (BBPadi), Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) merekomendasikan penggunaan beberapa varietas unggul toleran kekeringan.

Sejumlah varietas unggul baru padi yang cocok untuk ditanam di lahan kering telah dilepas Kementerian Pertanian (Kementan). Saat ini berbagai jenis padi unggul yang dikembangkan oleh Balitbangtan diberi nama padi

Inpago yang merupakan singkatan dari 'inbrida padi gogo'.

Varietas unggul padi inpago yang diperuntukkan untuk lahan kering umumnya memiliki produktivitas tinggi, tahan kekeringan, tahan terhadap kondisi tanah masam serta tahan terhadap penyakit blas yang menjadi musuh terbesar petani padi gogo.

Salah satu varietas padi gogo terbaru yang diluncurkan oleh Balitbangtan diberi nama Inpago 11 Agritan. Varietas tersebut dikembangkan ke petani setelah melalui pengujian di berbagai lahan kering di Indonesia.

Selain memiliki produktivitas 6 t/ha, varietas tersebut juga tahan terhadap penyakit blas. Varietas baru ini diharapkan dapat menjadi teknologi andalan bagi petani di lahan kering untuk meningkatkan produksinya. **(BBPadi/tim humas)**

INI VARIETAS JAGUNG HIBRIDA DENGAN HASIL TINGGI

JAGUNG telah menjadi komoditas nasional yang strategis dan diperkirakan lebih dari 70 persen kebutuhan jagung dalam negeri digunakan untuk pakan dan sisanya digunakan untuk industri makanan, benih dan konsumsi pangan. Permintaan pasar cenderung meningkat, baik untuk memenuhi kebutuhan industri pakan ternak dan industri makanan dalam negeri serta untuk ekspor.

Meningkatnya kebutuhan akan jagung tersebut, Badan Litbang Pertanian (Balitbangtan) melalui UPT-nya Balai Penelitian Tanaman Serealia, Maros (Balitsereal), terus berinovasi dengan melepas varietas-varietas unggul baru dengan hasil lebih tinggi dari varietas sebelumnya.

Varietas unggul baru jagung dengan nama varietas JH 29 dan JH 30 telah disetujui untuk dilepas oleh Tim Pelepas Varietas Tanaman Pangan (TPVTP) pada Juni 2019 di Bogor. Berdasarkan deskripsinya potensi jagung hibrida JH29 mencapai 13,6 t/ha dengan rata-rata hasil 11,7 t/ha, sedangkan varietas jagung hibrida JH30 potensi hasilnya mencapai 12,6 t/ha dengan rata-rata hasil 11,3 t/ha.

Menurut Dr Roy Effendi selaku pemulia jagung pada

kedua varietas tersebut menyampaikan bahwa jagung hibrida JH29 dan JH30 dari segi potensi dan rata-ratanya nyata lebih unggul dibanding varietas JH27 dan Bisi 18. "Selain meningkatkan hasil, jagung varietas JH29 dan JH30 telah ditingkatkan kandungan protein dan karbohidratnya," ujarnya.

Kandungan protein varietas JH29 lebih tinggi 10,00 persen dari varietas jagung JH 27 dan varietas JH 30 memiliki kandungan lemak yang tinggi, yaitu 9,03 persen. Selain itu, berdasarkan hasil analisis stabilitas hasil, JH 29 memiliki stabilitas hasil yang luas, sedangkan JH 30 cocok untuk dibudidayakan di dataran menengah dan tinggi karena lebih tahan penyakit hawar daun di dataran tinggi. Dengan dilepasnya dua varietas jagung hibrida tersebut, maka Balitsereal telah memiliki 39 varietas jagung hibrida. **(uje/rtpH/tim humas)**



Inpres Terbit, Intensif Cegah **Penyakit** Hewan Menular



KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) berkomitmen mencegah dan menanggulangi tersebarnya penyakit hewan yang dapat menular ke manusia atau sebaliknya (zoonosis) serta penyakit infeksi baru (emerging diseases). Ini sesuai dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) RI Nomor 4/2019 Tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia.

"Untuk itu kami bersama kementerian atau lembaga (K/L) lainnya terus bersinergi dalam upaya mencegah, mendeteksi dan merespon zoonosis dan penyakit Infeksi Baru," ujar Fadjar Sumping Tjatur Rasa, direktur Kesehatan Hewan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementan dalam Lokakarya Penyusunan Rencana Kerja Program Emerging Infectious Disease Threats Next Generation (EDiT Next-GEN) (10/7/2019).

Tim Leader FAO ECTAD Indonesia, James McGrane menyampaikan bahwa Program EDiT Next-GEN yang didukung USAID merupakan bentuk kerjasama global

dalam rangka menciptakan ketahanan kesehatan global. Indonesia mempunyai peran yang sentral. "Selain menjadi Ketua Troika program ketahanan kesehatan global (GHSA) pada 2016, Indonesia juga merupakan pimpinan rencana aksi untuk pengendalian zoonosis secara global" ungkapnya.

Di lain pihak, menjelang Hari Raya Idul Adha, Ditjen PKH Kementan menghimbau masyarakat untuk mewaspadai kemungkinan timbulnya kasus Anthraks pada hewan yang akan dijadikan sebagai hewan kurban. "Anthraks, penyakit hewan yang disebabkan bakteri ini bisa menyerang hewan seperti sapi, kerbau, dan kambing/domba, tapi bisa juga ditularkan ke manusia (zoonosis, red) melalui kontak dengan hewan tertular atau benda/lingkungan yang sudah dicemari agen penyakit," ujar Dirjen PKH, Kementan I Ketut Diarmita pada Kamis (11/7/ 2019).

"Meski berbahaya, penyakit anthrax di daerah tertular bisa dicegah dengan vaksinasi yang disediakan pemerintah. Sedangkan, untuk daerah bebas Anthraks bisa dicegah dengan pengawasan lalu lintas hewan yang ketat," tandasnya.

Terkait dengan rabies, Kementan melalui Badan Karantina Pertanian (Barantan) memberikan 2.000 dosis vaksinasi gratis kepada hewan penular rabies/HPR, anjing di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Tujuan pemberian vaksinasi gratis ini untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa rabies dapat dicegah penyebarannya antar daerah dan antar pulau serta dapat dicegah penularannya secara signifikan melalui penerapan vaksinasi yang disiplin dan berkelanjutan di daerah asal.

"Salah satu kebijakan karantina hewan yang harus kami lakukan adalah mempertahankan status bebas dari penyakit pada suatu area. Dan untuk rabies, vaksinasi merupakan hal yang penting dilakukan dalam mencegah penyebaran dan penularannya," ujar Kepala Barantan Ali Jamil, saat kegiatan vaksinasi rabies gratis di SOR Ciateul, Kab Garut (11/7/2019). **(tim humas)**



Bangun Korporasi Petani, Penyuluh JADI GARDA TERDEPAN

KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) tidak hanya fokus pada faktor produksi yang bermuara pada swasembada pangan, tetapi juga peningkatan kesejahteraan petani. Karenanya, penyuluh pertanian sebagai garda terdepan dalam pendampingan petani menjadi krusial, sehingga peningkatan kompetensi perlu dilakukan secara berkesinambungan.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementan melaksanakan Bimbingan Teknis Penyuluhan Pertanian dalam mendukung gerakan membangun korporasi petani dan Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes) di D.I. Yogyakarta, Minggu (14/7/2019). Kegiatan ini diikuti penyuluh pendamping Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP), pengelola PosLuhDes, Penyuluh Swadaya dan Penyuluh Swasta dari seluruh Indonesia.

Kegiatan mensinergikan penyuluh pemerintah, swadaya, dan swasta yang baru pertama kali digelar ini diharapkan dapat menumbuhkan serta mengembangkan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP), sehingga terwujud korporasi di tingkat petani yang berdaya saing dan profesional.

Kepala BPPSDMP Momon Rusmono menginginkan bahwa penyuluh pemerintah, swadaya dan, swasta mampu berkolaborasi hingga tingkat desa. "Mekanisme tetap harus dikendalikan dinas kabupaten, di tingkat kecamatan ada Balai Penyuluhan Kecamatan, di tingkat desa saya minta ke depan tempat menyatunya para penyuluh di Posluhdes," ungkapnya saat membuka kegiatan, Minggu (14/7/2019).



Penyuluh pemerintah, swadaya dan, swasta mampu berkolaborasi hingga tingkat desa. "Mekanisme tetap harus dikendalikan dinas kabupaten, di tingkat kecamatan ada Balai Penyuluhan Kecamatan, di tingkat desa saya minta ke depan tempat menyatunya para penyuluh di Posluhdes."

Momon Rusmono

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP)





Momon menambahkan, model korporasi petani memang terus digenjot pemerintah untuk meningkatkan posisi tawar petani terhadap pasar. Pemerintah berharap kesejahteraan mereka dapat meningkat bila petani bersatu. Bentuk korporasi petani tersebut, bisa Koperasi maupun Badan Usaha Milik Petani (BUMP) berbentuk PT maupun Usaha Dagang (UD).

Dalam korporasi petani tersebut juga bisa membuka diversifikasi, pengolahan bahkan perluasan pasar dari komoditas tersebut. "Syarat utama korporasi petani bisa berjalan adalah mengubah pola pikir petani menjadi seorang wirausaha. Sehingga untuk menjadi seorang wirausaha, petani harus kreatif dan inovatif dalam mengembangkan ide serta mampu menerapkan kreatifitas tersebut," ujarnya.

Selain korporasi petani, BPPSDMP juga terus menggenjot peningkatan fungsi Posluhdes. Ini mengingat desa merupakan skup ekonomi terkecil dalam satu wilayah, kawasan maupun sentra pertanian.

Momon menegaskan, keberadaan Posluhdes harus terus diperjuangkan, karena menjadi sarana penyuluhan yang langsung menyentuh dan bergerak bersama petani. Salah satu fungsi Posluhdes adalah memberikan informasi teknologi kepada petani.

"Kehadirannya (Posludes, red) dapat mengatasi keteringgalan informasi di desa. Posluhdes juga sebagai wadah pembelajaran di tingkat desa yang diselenggarakan secara partisipatif dengan pendampingan penyuluh pertanian," kata Momon. **(tim humas)**



■ Target Perkebunan Nomor Satu Dunia



KEMENTAN

Luncurkan Program

BUN500

PEMERINTAH menargetkan perkebunan Indonesia menjadi nomor satu dunia pada 2024. Nah untuk mencapai target tersebut, Kementerian Pertanian (Kementan) meluncurkan Program BUN500 (Benih Unggul Perkebunan) yang mendistribusikan 500 juta batang benih pada 2019-2024 secara gratis untuk masyarakat, khususnya perkebunan rakyat.

“Kita harus bangkitkan kejayaan rempah Indonesia. Saat ini bahkan ekspor pertanian kita didominasi komoditas perkebunan. Demi meningkatkan produktivitas, Kementan sudah memulai penyiapan benih unggul gratis sejak tiga tahun lalu dengan anggaran Rp5,5 triliun,” kata Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman saat Peluncuran BUN500 di Palangkaraya, Kalimantan Tengah (Kalteng) pada Kamis (18/7/2019).

Melalui BUN500 selama lima tahun hingga tanaman berproduksi, Kementan menargetkan nilai produksi mencapai Rp274,9 triliun. Bahkan hingga produk olahan, nilai produksi BUN500 berpotensi mencapai lebih dari Rp1.180 triliun. Dengan industri pengolahan, penyerapan tenaga kerja diproyeksi lebih dari 9,5 juta orang atau meningkat 40 persen dari total tenaga kerja perkebunan saat ini.

Dirjen Perkebunan Kasdi Subagyono menyatakan, Program BUN500 ini menargetkan peningkatan



Kita harus bangkitkan kejayaan rempah Indonesia. Saat ini bahkan ekspor pertanian kita didominasi komoditas perkebunan. Demi meningkatkan produktivitas, Kementan sudah memulai penyiapan benih unggul gratis sejak tiga tahun lalu dengan anggaran Rp5,5 triliun.”

Andi Amran Sulaiman
Menteri Pertanian



produktivitas hingga ti kali lipat dengan menyediakan benih bermutu, berkualitas, dan bersertifikat.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan pada 2014-2018, PDB perkebunan mencapai Rp1.801,4 triliun, sedangkan nilai ekspor perkebunan mencapai Rp1.874,5 triliun, dan akumulasi tambahan nilai ekspor Rp333,1 triliun. Sektor ini juga menyerap 23,9 juta orang tenaga kerja, dengan komoditas dengan kontribusi besar antara lain sawit, karet, kakao dan kopi.

Terkait pembangunan pabrik gula (PG), sejak 2016 Kementan selalu memberikan karpet merah investasi pertanian, salah satunya untuk pendirian pabrik gula baru. Setidaknya ada 17 investor minat pembangunan pabrik gula senilai total Rp41,44 triliun. Investasi pabrik tersebut berpotensi meningkatkan tambahan produksi sebanyak 2,35 juta ton. Pemerintah juga sudah menargetkan 10 PG baru yang dibangun dan tiga pabrik di antaranya sudah mulai giling perdana. "Kita targetkan membangun 10 pg baru di Indonesia, yang sudah jadi ada delapan pabrik. Bahkan tiga di antaranya sudah giling perdana. Kalau semua pg baru beroperasi total, impor selesai (tidak ada lagi impor gula, red)," ungkap Mentan Amran.

Salah satunya PG di Bombana, Sulawesi Tenggara yang bisa mengolah tebu dengan kapasitas 12 ribu ton cane per day (TCD). Lalu ada PG di Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan, yang bisa menghasilkan dan mengolah gula lahan rawa. Satu-satunya di Asean. Termasuk PG RMI di Desa Rejoso, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar dengan kapasitas 10 ribu TCD dengan masa giling 100 hari.

Sementara dalam rangka meningkatkan penyerapan karet rakyat di dalam negeri, peningkatan dan penstabilan harga pada tingkat petani, serta untuk pelaksanaan peremajaan kebun karet rakyat, maka pemerintah mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi dalam melaksanakan Program Strategis Nasional untuk Peningkatan Pembelian dan Harga Karet Rakyat, serta Peremajaan Kebun Karet Rakyat.

"Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan harga karet antara lain meningkatkan kerja sama International Tripartite Rubber Council (ITRC) dan atau negara-negara pengekspor karet untuk mendorong peningkatan harga ekspor karet yang adil dan remuneratif melalui penerapan Agreed Export Tonnage Scheme (AETS), Demand Promotion Scheme (DPS), Supply Management Scheme (SMS) serta pembentukan Regional Rubber Market (RRM) dan ASEAN Rubber Council (ARC) maupun kerja sama lainnya," ujar Kasdi Subagyo, dirjen Perkebunan.

Kemudian, lanjut dia, menyusun dan menetapkan rencana aksi peningkatan pembelian dan harga karet rakyat, serta peremajaan kebun karet rakyat untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang; menyusun skema pendanaan untuk program peningkatan dan stabilisasi harga pembelian karet rakyat; menyusun kebijakan, kelembagaan, dan pembiayaan peremajaan kebun karet rakyat; menetapkan kebijakan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan peningkatan pembelian dan harga karet rakyat, serta peremajaan kebun karet rakyat. **(tim humas)**



KARANTINA-POLRI

Semakin **SOLID**

Perangi **Penyelundupan**



UNTUK meningkatkan pengawasan dan pengamanan terhadap sumberdaya alam (SDA) Indonesia, Badan Karantina Pertanian (Barantan) Kementan meneken Nota Kesepahaman (MoU) dengan Polri dalam Pedoman Kerja Pengawasan dan Penegakan Hukum Karantina Hewan dan Tumbuhan.

MoU tersebut ditandatangani Kepala Barantan Ali Jamil dengan Asisten Kapolri bidang Operasi Irjen Pol Martuani Sormin di Gedung Kementan, Rabu (17/7). MoU ini sebagai tindak lanjut kerja sama Kementan dengan Polri dan meningkatkan sinergitas Barantan dan Polri.

MoU tersebut memuat beberapa hal di antaranya pertukaran data dan informasi, bantuan pengawasan tertutup dan terbuka, penegakkan hukum, peningkatan sarana dan prasaranan, serta peningkatan kapasitas sumberdaya manusia (SDM). "MoU ini merupakan revisi atau pembaharuan dari MoU sebelumnya, yakni pada 2016 dan 2016. Jadi ini pembaharuan yang kedua," kata Ali Jamil.

Sementara untuk memperkuat Sistem Perkarantina, Kementan menjajaki transfer Teknologi Bio-Sensing dari Belanda. Ini didasari atas luas wilayah NKRI, terlebih dengan ribuan pulau yang menimbulkan banyak tempat pemasukan dan pengeluaran dibandingkan dengan jumlah SDM Perkarantina yang dimiliki saat ini. Karenanya diperlukan terobosan inovasi dan teknologi agar dapat tetap menjamin kelestarian SDA hayati yang sangat kaya ini, termasuk menjamin kesehatan masyarakat. "Ini merupakan tantangan juga bagi negara-negara di daratan benua Eropa, SDM Perkarantina yang terbatas dibandingkan luas wilayah yang harus dijaga. Di Pelabuhan Rotterdam di Belanda sebagai satu-satunya pintu masuk benua Eropa menerapkan teknologi bio-sensing untuk pengawasan. Ini yang menjadi perhatian kami," kata Ali Jamil saat memberikan keterangan tertulisnya dari Amsterdam, Belanda, Selasa (23/7/2019).

Sementara Kementan juga telah menurunkan tim untuk menelusuri padi varietas IF8 yang diklaim mempunyai

produktivitas tinggi dan banyak tersebar di Aceh. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, saat mendapat laporan ada varietas padi IF8 yang mempunyai produktivitas tinggi, pihaknya langsung merespon dengan cepat. Bahkan meminta Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVT-PP) untuk melihat langsung varietas tersebut. Apalagi dilaporkan bahwa varietas tersebut dihasilkan oleh petani kecil.

"Kami telah turunkan tim ke lapangan untuk cek varietas

padi IF8 tersebut. Bahkan tim kami langsung membawa formulir untuk pendaftaran varietas tersebut. Karena laporannya yang menghasilkan petani kecil, kami iba dan memberangkatkan malam itu juga ke lapangan," katanya di Jakarta.

Kepala PVT-PP Kementan Prof Erizal Jamal menegaskan, dalam mengedarkan benih padi, pihaknya tidak akan main-main atau sembarangan. Pasalnya, benih merupakan fondasi pertanian, sehingga diatur ketat oleh aturan main. Untuk itu, perlu penanganan yang



cermat terhadap kasus peredaran benih IF8. Semua pihak harus mematuhi aturan yang ada dan menjaga petani yang mengusahakannya dari kerugian yang tidak perlu terjadi. Contohnya, wabah hama ulat grayak yang menyerang tanaman pangan pokok secara meluas di Zambia, Zimbabwe, Afrika Selatan, Ghana, bahkan Malawi, Mozambik dan Namibia, karena masuknya benih berpenyakit.

Di lain pihak, petugas Barantan kembali menggagalkan pemasukan 216 ekor burung ilegal dari Filipina di Terminal 2F Bandara Soekarno Hatta pada Rabu, Kamis (25/7) dinihari. Sebanyak empat orang WNI yang datang dari Filipina membawa ratusan burung berjenis lovebirds yang dimasukkan dalam pipa paralon PVC yang sudah didesain dan disembunyikan dalam tas ransel. "Modus pelaku kita ketahui dari interogasi pelaku sebelumnya, sampai kita ketahui lagi ada aksi pada dini hari tadi," kata Kepala Pusat Kepatuhan, Kerja Sama dan Informasi Perkarantina drh Sujarwanto di Kantor Pusat Barantan, Jakarta. **(tim humas)**



KOLAM SUSU dan SURGA PANGAN INDONESIA

SEJAK dulu kekayaan alam Indonesia dikenal sangat melimpah. Bahkan kekayaan alam itu diabadikan dalam sejumlah lagu. Salah satunya lagu bertajuk 'Kolam Susu' garapan grup band legendaris Koes Plus. Lagu yang melegenda hingga sekarang itu karena lirik dan nadanya indah, ringan, serta menggambarkan dengan jelas betapa kaya alam Indonesia.

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian (Kementan), Kuntoro Boga Andri mengutip salah seorang personel Koes Plus Yon Koeswoyo bahwa lagu dibuat pada 1973 ini terinspirasi di sebuah tempat bernama Kolam Susu yang terletak di Desa Dualaus, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT). "Jadi saat itu Yon mengunjungi lokasi ketika dalam perjalanan dari Atambua ke Dili pada 1972. Dia menyaksikan alam kita benar-benar kaya, elok, dan unik," ujarnya meniru Yon pada media beberapa waktu lalu.

Kuntoro menambahkan, berdasarkan riset Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian (BB-Biogen) Kementan, ada sekitar 100 jenis pangan sumber karbohidrat, 100 jenis kacang-kacangan, 250 jenis sayuran serta 450 jenis buah

dimiliki Indonesia. Karena itu, bila menilai kekayaan pangan itu, dia menyesalkan masih ada anggapan yang menilai Indonesia belum mandiri dan swasembada, apalagi hanya dari satu sudut pandang satu komoditas saja. "Selama dikelola dengan baik, keanekaragaman pangan kita tidak hanya mampu mencukupi kebutuhan masyarakat Indonesia, tapi juga dunia," tandasnya di Jakarta, Senin (22/7/2019).

Sementara kebijakan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam membangun logistik pangan, khususnya komoditas hortikultura skala besar guna mengakselerasi ekspor mulai terwujud. Kementan bersama investor dan para pelaku usaha merancang membangun warehouse dan wholesaler di kota-kota besar seperti Surabaya, Semarang, Makassar, Banjarmasin, Medan dan lainnya. Ini berisi produk buah, sayur dan produk lokal Indonesia lainnya yang rencana dikirim ke warehouse dan wholesale milik Indonesia di luar negeri seperti Singapura, Malaysia, China, Hongkong, Jepang dan lainnya. Saat ini fokus warehouse di Suncity Biz Sidoarjo.

"Sesuai arahan Mentan untuk mewujudkan kedaulatan





Sesuai arahan Mentan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, Indonesia negara kepulauan harus memiliki gudang pangan skala besar, ditempatkan di kota besar seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, Makasar, Medan dan Banjarmasin.”

Suwandi
Dirjen Hortikultura

pangan, Indonesia negara kepulauan harus memiliki gudang pangan skala besar, ditempatkan di kota besar seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, Makasar, Medan dan Banjarmasin,” ujar Dirjen Hortikultura Suwandi dalam Pertemuan Koordinasi Pemasaran Produk Hortikultura di Kawasan Perdagangan Suncity Biz Sidoarjo, Senin (15/7/2019).

Di lain pihak, Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementan pada 2018 telah memutakhirkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) yang mencakup kabupaten/kota seluruh Indonesia. Peta tematik ini menggambarkan visualisasi geografis hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. Hasil FSVA 2018 menunjukkan 335 kabupaten (81 persen) berada dalam status tahan pangan dan 91 kota (93 persen) dikategorikan tahan pangan. “Jika dibandingkan dengan FSVA 2015, telah terjadi peningkatan status ketahanan pangan di 177 kabupaten,” ujar Kepala BKP Agung Hendriadi saat membuka FGD Sinergi Program Pengentasan Daerah Rentan Rawan Pangan, di Jakarta, Kamis (24/7/2019).

Di lain pihak untuk mengembangkan industri pangan berbasis tepung lokal, Kementan menggandeng pihak-pihak terkait seperti Kementerian Perindustrian, Badan Pengkajian Pengembangan Teknologi (BPPT), Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi). “Penandatanganan kerja sama dengan pihak-pihak terkait pada hari ini, merupakan langkah maju dan sebagai awal untuk mengembangkan industri pangan berbasis tepung lokal,” ujar Kepala BKP Agung usai penandatanganan yang dilanjutkan dengan FGD di kantor Menara Kadin Kuningan Jakarta, Rabu (24/7/2019).

Di tempat berbeda, Ketua Komite Tetap Agribisnis Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Andi Bachtiar Sirang sangat berterima kasih dan mengapresiasi apa yang sudah dikerjakan Kementan. “Apa yang sudah dirintis dan dikembangkan Kementan ini sangat bagus dan strategis, tidak hanya dalam mencukupi pangan bagi masyarakat di wilayah perbatasan, juga menjadikan arah yang jelas dalam meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat dipinggiran,” ujarnya dalam Focus Group Discussion (FGD) di kantor Kadin, Jakarta, Selasa (26/6/2019).

Sementara itu guna mengurangi ketergantungan terhadap produk impor, khususnya berbahan terigu, kini dikembangkan mi dari bahan pangan lokal. Balai Besar Pascapanen Pertanian, Badan Litbang Pertanian telah memiliki teknologi pengolahan mi berbahan baku tepung dalam negeri, seperti ubi kayu, shorgum, sagu dan anjeli. “Kita ini bukan produsen terigu, hampir 11 juta ton kita impor terigu tiap tahun. Karena itu, kita perlu memperhatikan kembali pangan lokal. Bahkan sesuai UU Pangan kita punya kewajiban mengembangkan pangan lokal,” kata Peneliti Balai Besar Pascapanen Pertanian, Heni Herawati. **(tim humas)**

e-Katalog, Modernisasi Alsintan, dan Kesejahteraan Petani

DALAM kurun waktu 4,5 tahun terakhir kesejahteraan petani mulai meningkat. Ini berkat mekanisasi pertanian yang dicanangkan Kementerian Pertanian (Kementan). Bahkan, melalui kebijakan digitalisasi e-Katalog pengadaan alat mesin pertanian (alsintan) juga mampu menghemat anggaran negara sampai Rp1,2 triliun.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, untuk mendorong mekanisasi pertanian, pemerintah telah melaksanakan pengadaan alsintan dalam jumlah besar. Pengadaan alsintan modern ini dimaksudkan agar petani bisa bersaing dengan negara lain. "Pembelian alsintan pun dilakukan secara digitalisasi seperti e-Katalog, sehingga, pembelian apapun langsung ke pabrik, harga murah dan datang tepat waktu. Semuanya karena e-katalog. Dengan cara ini harga juga turun, kemudian saya akumulasi pertahun penghematan anggaran sangat drastis," katanya.

Hitungannya, jika sebelumnya harga alsintan mencapai Rp28 juta per unit, maka setelah memanfaatkan e-Katalog harganya bisa turun menjadi Rp19 juta per unit. Setelah diakumulasi, penghematan anggaran pembelian alsintan bisa mencapai hingga Rp1,2 triliun. Sebab, semua alsintan yang dibeli langsung dari pabrik. Kementan hingga kini secara aktif mendorong modernisasi pertanian dengan pengembangan teknologi pertanian. Dari mulai perbenihan, cara tanam, perhitungan pola tanam berbasis IT, dan mekanisasi.

Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Ketut Kariyasa mengatakan, penggunaan alsintan

dalam memacu produksi selama empat setengah tahun ini sukses mendongkrak kesejahteraan petani hingga menurunkan kemiskinan penduduk desa secara keseluruhan. "Di samping itu, penggunaan Alsintan juga mampu memenuhi kelangkaan tenaga kerja dan mendorong generasi muda untuk terjun langsung ke sektor pertanian," ujarnya, Jumat (6/7/2019).

Menurut Kariyasa, hingga saat ini sudah lebih dari 400 ribu unit pemerintah mendistribusikan alsintan ke seluruh pelosok daerah. Jumlah ini bahkan meningkat 500 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Pengamat Sosial Ekonomi UI Riyanto mengatakan, kebijakan Kementan yang telah beradaptasi mendayagunakan teknologi 4.0 pada alsintan patut diapresiasi. "Jadi kalau kita tidak ikut adaptasi, masuk ke revolusi industri 4.0 berpotensi ke depan akan kekurangan pangan di Indonesia," ujarnya, Selasa (2/7/2019).

Riyanto menuturkan, implementasi teknologi 4.0 pada mekanisasi pertanian diperkirakan bakal mampu memberikan manfaat dua arah, yakni di hulu dan hilir. "Dengan begitu Indonesia dapat menyiapkan ketahanan pangannya," tandasnya.

Sementara Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin), Kementan juga tengah membangun digitalisasi pendataan populasi ternak seperti sapi, kerbau dan ayam secara online.

Kepala Sub Bagian Data Peternakan dan Perkebunan Akbar Yasin menjelaskan, digitalisasi pendataan populasi ternak ini merupakan salah satu pemanfaatan



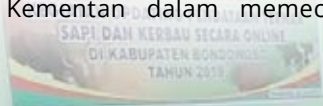


teknologi informasi dalam sektor peternakan. Pasalnya, pengumpulan data populasi ternak selama ini dilakukan secara manual dan berjenjang oleh petugas kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat atau menggunakan perhitungan populasi ternak berdasarkan dinamika populasi ternak hasil survei ongkos usaha ternak yang dilakukan BPS.

Di lain pihak, Kepala Badan Litbang Pertanian Kementan, Fadry Djufry menegaskan mulai 2020, pihaknya fokus kerja mendukung kebijakan dan program strategis Kementan. Segala teknologi dan inovasi yang dihasilkan menjadi terobosan Kementan dalam memecahkan

masalah guna kesuksesan pencapaian swasembada pangan dan peningkatan kesejahteraan petani. "Jika selama ini teknologi dan inovasi yang dihasilkan hanya sebatas publikasi milik penelitiannya, kita ubah menjadi ke depannya hasil riset itu harus berdampak langsung untuk bisa kesuksesan program yang ingin diwujudkan menteri," ujarnya saat memberikan sambutan pada Orasi Purna Tugas Prof Dr Ir Achmad Suryana di Bogor, Jumat (26/7/2019).

Di tempat terpisah, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada (UGM) Jamhari mendukung modernisasi di sektor pertanian yang saat ini sedang





dikembangkan Kementan. Pertanian modern menjadi kunci menarik minat anak muda untuk terjun ke sektor pertanian. "Peluang di sektor pertanian itu masih sangat besar. Tapi persepsi di masyarakat itu bertani masih identik dengan pekerjaan kumuh. Padahal dengan pertanian modern, bertani bisa dilakukan tanpa perlu berkotor-kotoran," terangnya di hadapan para pelajar SMA se-Jabotabek saat hadir sebagai pembicara kegiatan Agrivaganza di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Sabtu (14/7/2019).

Sementara salah satu upaya pemerintah memberikan perlindungan kepada petani, yakni dengan Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Sayangnya tak mudah bagi pemerintah mengajak petani mengeluarkan uang untuk membayar premi asuransi pertanian tersebut. Untuk memudahkan petani mengikuti program pemerintah itu, Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap membuat alternatif dengan gagasan memasukkan biaya premi AUTP ke dalam biaya sewa atau operasional penggunaan alat mesin pertanian yang dikelola Usaha Pengelolaan Jasa Alsintan (UPJA). Dengan demikian setiap penggunaan alat mesin pertanian dalam proses budidaya padi secara otomatis usaha tani padi petani sudah terdaftar dalam program AUTP.

"Melalui sistem otomasi pengelolaan brigade alsintan berbasis pola insentif asuransi usaha tani padi, maka biaya penggunaan alsintan bantuan pemerintah menjadi lebih murah," kata Sigit Widiyanto, kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian KabCilacap.

Kisah Donnie Aqsha

Persoalan yang dihadapi petani terbilang cukup rumit. Dari mulai masalah budidaya hingga pemasaran. Berbagai upaya dilakukan

pemerintah untuk membantu petani keluar dari permasalahan yang menyelimuti tersebut. Dari mulai pembinaan petani dalam budidaya melalui penerapan Good Agriculture Practices (GAP) hingga membantu pemasaran produk petani dengan menerapkan kebijakan harga dan membangun lembaga pemasaran, seperti Toko Tani Indonesia (TTI).

Namun dengan berkembangnya era digitalisasi, kini tumbuh start-up pertanian dari generasi milenial yang siap membantu petani dalam membina cara budidaya pertanian yang baik hingga pemasarannya. Salah satunya Donnie Aqsha, start-up pertanian 'agrowing.co.id'.

"Fokus kita adalah membantu petani agar bisa budidaya buah sesuai dengan GAP," kata Donnie di sela-sela AgriVaganza dalam peringatan Hari Krida Pertanian di Gedung Kementan, Jakarta, Kamis (11/7/2019).

(tim humas)



PEJABAT ESELON 1 (MADYA)

- **Dr Ir Momon Rusmon Ms** sebagai Sekjen Kementan
- **Dr Ir Prihasto Setyanto MSc** sebagai Dirjen Hortikultura
- **Dr Ir Suwandi** sebagai Dirjen Tanaman Pangan
- **Prof (R) Dr Ir Dedi Nursyamsi MAgr** sebagai Kepala BPPSDMP
- **Dr Ir Sumardjo Gatot Irianto** sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Investasi Pertanian

PEJABAT ESELON 2 (PRATAMA)

- **Ir Indah Megahwati MP** sebagai Direktur Pembiayaan Pertanian, Ditjen PSP
- **Dr Ir Leli Nuryati MSc** sebagai Kapus Penyuluhan BPPSDMP
- **Dr Ir Siti Munifah MSi** sebagai Sekretaris BPPSDMP
- **Dr Ir Retno Sri Hartati M** sebagai Kepala Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian, Setjen Kementerian Pertanian
- **Ardi Praptono SP MAgr** sebagai Direktur Perlindungan Perkebunan, Ditjen Perkebunan
- **Dr drh Kresno Suharto** sebagai Kepala BB Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan, Surabaya, Ditjen Perkebunan
- **Ir Sumardi Noor MSi** sebagai Kepala BB Pelatihan Pertanian, Ketindan, BPPSDMP



PEJABAT BARU, JANGAN MAIN-MAIN DENGAN

KKN

GERBONG Kementerian Pertanian (Kementan) mengalami perombakan. Sebanyak 12 pejabat yang terdiri dari lima pejabat Eselon 1 dan tujuh pejabat Eselon 2 menduduki posisi baru (lihat grafis). Kepada para pejabat yang dilantik, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengingatkan terkait masalah yang krusial, yakni KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme). Apalagi persoalan tersebut sejak awal menjadi arahan dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

"Sejak awal pemerintahan, Bapak Presiden (Jokowi, red) mengarahkan dan mengingatkan untuk membebaskan KKN. Karena itu, kami harus memulai hal itu dari Kementan," kata Amran saat pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementan di Jakarta, Senin (29/7/2019).

Dia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan bermain-main dalam masalah KKN. Di Kementan setidaknya sekitar 1.500 pegawai yang dibebastugaskan karena persoalan KKN.

Dalam upaya memberi contoh untuk bersih dari KKN, Amran pernah menutup perusahaan racun

tikus miliknya yang bergerak di seluruh Indonesia, karena mendapat amanah menjadi Mentan. Padahal omzet perusahaan tersebut mencapai Rp250 triliun.

Contoh lainnya, Amran juga tidak meloloskan seseorang yang pernah menjadi dosennya menjadi pejabat Eselon 1. Meski orang tersebut telah mendaftar dua kali dan lulus seleksi menjadi pejabat, bahkan orang tersebut merupakan lulusan Harvard University, Amerika Serikat (AS). "Kami ingin menjadi teladan bagi bawahan. Jadi saat ini kami minta jangan ada lagi titipan. Karena titipan itu bisa menghinakan pada yang menitip dan dititip," tegasnya.

Amran beralasan, jika ada pejabat titipan, maka loyalitas orang tersebut hanya fokus pada pejabat yang mendapat titipan, sehingga pekerjaan menjadi tidak fokus.

Amran kembali memberikan contoh, Presiden Jokowi sewaktu menjadi Wali Kota Solo juga mengingatkan kepada anaknya untuk tidak melanjutkan usahanya dan jangan berkunjung ke Wali Kota Solo. "Ini menjadi teladan kami untuk bersikap yang sama," ujarnya. **(tim humas)**



Sub Sektor Holtikultura ke Prancis 2019



JAN	Volume: 1551.225 Nilai: 340.499	MAR	Volume: 250.953 Nilai: 298.303	MEI	Volume: 268.360 Nilai: 322.939
FEB	Volume: 63.846 Nilai: 124.839	APR	Volume: 291.788 Nilai: 409.974	JUN	Volume: 151.072 Nilai: 213.365

*Volume dalam satuan kg | **Nilai dalam US Dolar
Sumber: Pusat Data & Sistem Informasi Pertanian Kementan

KOMODITAS

- Tanaman Hias
- Nanas
- Jeruk
- Buah Naga
- Turmeric
- Sayuran
- Manggis
- Salak
- Jahe
- Tanaman Biofarmaka



"Negara kita atau pertumbuhan ekonomi bisa bangkit karena 2 hal, yaitu ekspor dan investasi. Kedepan 2 hal ini akan kami dorong terus"
- Andi Amran Sulaiman -
Menteri Pertanian